

SKRIPSI

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHUN 2017 DI KABUPATEN BREBES

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1)
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pancasakti Tegal

O l e h :

Nama : AMIRUDIN SYAH

NPM : 2118500109

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2020**



PERSETUJUAN

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHUN 2017 DI KABUPATEN BREBES

SKRIPSI

Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata S1 untuk mencapai
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

Nama : AMIRUDIN SYAH

NPM : 2118500109

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Drs. Djoko Suyono, M.Si
NIPY. 2451891956

Pembimbing II

Unggul Sugi Harto, S.IP. M.Si
NIPY 14251921973



PANITIA UJIAN SKRIPSI SEMESTER GASAL T.A 2019/2020
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km.1 Tegal Telp (0283) 323290

PENGESAHAN




PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHUN 2017 DI KABUPATEN BREBES


Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Pada hari : Kamis
Tanggal : 16 Januari 2020

Dewan Penguji :

Ketua Dewan Penguji : Dra. Sri Sujiatmi, M.Si
NIP. 196305271988032001
Sekretaris Dewan Penguji : Unggul Sugiharto, M.Si
NIPY 14251921973
Anggota Dewan Penguji : Drs. Djoko Suyon, M.Si
NIP. 2451891956

()
()
()

Dekan,

Dr. Nuridin, SH.,MH
NIPY 9351091960

PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

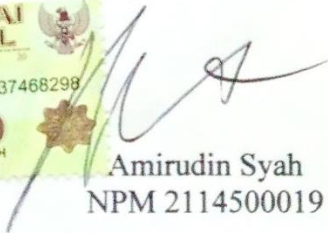
Nama : Amirudin Syah
NPM : 2118500109
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Dalam
Pengawasan Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2017
Di Kabupaten Brebes.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar dibuat dan disusun sendiri bukan buatan hasil karya orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademis.

Brebes, 20 Januari 2020




Amirudin Syah
NPM 2114500019

MOTTO :

“Ikuti Alurnya Nikmati Prosesnya, Tuhan tahu kapan kita harus bahagia”

“Mengeluh tidak akan memperbaiki keadaan maka semangatlah buat hari ini , jalani dengan ikhlas dan rasa sabar”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Untuk ibunda Farikha yang selama ini selalu mendukung, mendoakan serta menemani setiap langkah proses perjalanan kuliah sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini. Terimakasih untu ksemuanya.
2. Untuk istriku tercinta Fitri Maryanti dan anak-anaku yang selama ini sudah mendampingiku berbagi suka maupun duka, memberi support dan mendoakan selalu dari awal menjalani kuliah hingga saat ini salam bahagia dan terimakasih untuk keluarga kecilku.
3. Untuk Saudara – saudaraku semoga sehat selalu dan deberi kelancaran dalam suatu apapun dan semoga tambah rejekinya
4. Terimakasih untuk keluarga besar bani Singadiwangsa dan bani Sarpan yang telah memberikan Do'adan support serta limpahan kasih sayang yang tulus
5. Teman-teman dan sahabat perjuangaku FISIP kalian luar biasa
6. Dosen-dosenku yang telah menjadi orang tua kedua yang selalu memberikan motivasi dan ilmu bermanfaat
7. Almamaterku Tercinta terimakasih.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr.Burhan Eko Purwanto, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Dr. Nuridin, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Drs. Djoko Suyono, M.Si selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Unggul Sugi Harto. S.IP. M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Drs. Sri Teguh Pambudi, M.Si selaku Inspektur Kabupaten Brebes
6. Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kabid Wil II Inspektorat Kab. Brebes memberikan dukungan.
7. Segenap Auditor, P2UPD dan Staf Inspektorat Kabupaten Brebes yang telah memberikan dukungan dan bantuan informasi dalam membuat skripsi ini.

8. Segenap teman-teman Irban Wilayah II Inspektorat Kabupaten Brebes, Pendamping Desa Kecamatan Bantarkawung, segenap jajaran Pemerintahan Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan dan Desa Ciomas Kec. Bantarkawung yang mau membantu membeerikan informasi
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
10. Rekan-rekan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak atas segala bantuan dan jasa yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang budiman.

Tegal, 20 Januari 2020

Penulis

ABSTRAK

Nama : Amirudin Syah NPM : 2118500109 Judul : Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Dana Desa (DD) Di Kabupaten Brebes

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes.

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif yaitu analisa yang bertujuan untuk mendiskripsikan data-data secara naratif mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Brebes dari kegiatan Perencanaan, kegiatan Reviu, kegiatan monitoring/pemantauan, kegiatan evaluasi, kegiatan pengujian, kegiatan penilaian dan kegiatan pengusutan, sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang ada namun tidak maksimal. Ini dikarenakan faktor kuantitas sumberdaya manusia yang sangat terbatas. Pegawai inspektorat hanya berjumlah 54 orang, sedang jumlah desa yang ada di Kabupaten Brebes sebanyak 292 Desa. Belum lagi tugas pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Brebes terhadap instansi pemerintah daerah yang lain. Jumlah pegawai yang ada sangat tidak sebanding dengan beban kerja inspektorat yang begitu banyak. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV, Irban – Irban ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur meliputi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dan Kecamatan serta Desa (termasuk Dana Desa) sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang ditetapkan. Sehingga tidak semua desa yang ada di Kabupaten Brebes mendapat pengawasan dari inspektorat setiap tahunnya. Pelaksanaan pengawasan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes hanya bisa dilaksanakan 2 sampai 3 tahun sekali.

Kata Kunci : Pengawasan , Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat

ABSTRACT

Name: Amirudin Syah NPM: 2118500109 Title: Implementation of Principal Tasks and Inspectorate Functions in Village Fund Supervision (DD) in Brebes Regency

The purpose of this study is to determine the implementation of the duties and functions of supervision carried out by the Brebes Regency Inspectorate in the use of Village Funds in Brebes Regency.

This type of research uses descriptive qualitative research type that is analysis that aims to describe data narratively about the Implementation of the Regional Inspectorate Supervision Function on the Use of Village Funds in Brebes Regency.

The results of the study can be seen that the Implementation of Main Tasks and Function of the Brebes Regency Inspectorate from Planning activities, Review activities, monitoring activities, evaluation activities, testing activities, assessment activities and investigating activities, have been carried out in accordance with the existing SOP but not optimally. This is because the quantity of human resources is very limited. Inspectorate staff are only 54 people, while the number of villages in Brebes Regency is 292 villages. Not to mention the supervisory duties carried out by the Inspectorate of Brebes towards other local government agencies. The number of existing employees is not comparable with the workload of the inspectorate that is so much. Supervision is carried out by the Assistant Inspectors Region I, II, III and IV, Urban - This urban has the main task of carrying out part of the tasks of the Inspector covers the area of guidance and supervision work in agencies / work units within the Government of Brebes Regency and Districts and Villages (including the Village Fund) in accordance with the established annual supervision work program (PKPT). So that not all villages in Brebes Regency get supervision from the inspectorate every year. The supervision of the use of Village Funds in Brebes Regency can only be carried out once every 2 to 3 years.

Keywords: *Supervision, Implementation of Main Tasks and Function of Inspectorate*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	11
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1 Kerangka Teori	14
II.2 Definisi Konsep	42
II.3 Pokok-pokok Penelitian	44

II.4 Alur Pikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	
III.1 Tipe Penelitian	47
III.2 Jenis dan Sumber Data.....	48
III.3 Informan Penelitian	50
III.4 Teknik Pengumpulan Data	51
III.5 Teknik dan Analisa Data	54
BAB IV DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN	
IV.1 Deskripsi Kabupaten Brebes Brebes	57
IV. 2. Gambaran Inspektorat Kabupaten Brebes	63
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
V.1. Hasil Penelitian	79
V.2. Pembahasan	158
BAB VI PENUTUP	
VI.1 Kesimpulan	168
VI.2 Saran	169
DAFTAR PUSTAKA	171

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Setiap Kecamatan di Kabupaten Brebes	61
Tabel IV.2 Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Brebes	62
Tabel IV.3. Keadaan Pegawai menurut Golongan Ruang	74
Tabel IV.4. Keadaan Pegawai menurut Pendidikan	75
Tabel IV.5. Keadaan Pegawai menurut Jabatan	75
Tabel. IV.6. Keadaan Aset Inspektorat Kabupaten Brebes	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Alur Pikir Penelitian	46
Gambar IV.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Brebes	73

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Salah satu aspek yang sangat penting dan menunjang adalah kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan manusia pelaksananya. Sebab apapun yang dimiliki oleh suatu bangsa, kekayaan alam, sosial, budaya, dan lain-lain tidak akan berarti bila tidak di tangani oleh manusia-manusia berkualitas. Baik itu berkualitas dari segi moral intelektual maupun dari segi mental spiritual. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang bisa tetap bertahan dari iklim persaingan yang sangat ketat dewasa ini.

Dalam melaksanakan tugas mewujudkan tercapainya tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan, agar laju pembangunan nasional serta laju pembangunan daerah di desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional di Indonesia pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah-masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan.

Pembangunan di daerah perkotaan menjadi perhatian yang lebih dari pemerintah. Sehingga pembangunannya relatif lebih cepat. Selain itu,

ketimpangan pembangunan juga terjadi karena banyak faktor lain yang mempengaruhinya sehingga membuat pembangunan di Indonesia semakin tidak merata dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat strategi guna mengatasi ketimpangan pembangunan daerah yaitu dengan cara melakukan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di daerah pedesaan.

Pembangunan di Desa pada Pemerintahan saat ini, menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita yang ketiga yakni Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan terkait desa menjadi instrument regulasi dalam menerapkan nawa cita presiden diatas.

Pengertian Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 maka otonomi daerah menjadi lebih luas, dimana desa diberi keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam

menunjang kesuksesan pembangunan nasional secara luas. Sehingga pembangunan desa menjadi prioritas utama keberhasilan pembangunan nasional.

Keberhasilan pembangunan di Desa tentunya tidak terlepas dari pemerintah desa yang melaksanakannya secara langsung. Maka desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di desa dan menuju kemandirian desa. Untuk itu pada Tahun 2015 pemerintah memberikan kucuran dana desa yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah kabupaten untuk dilanjutkan ke rekening desa- desa guna menunjang keberhasilan pembangunan di pedesaan.

Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang di alokasikan oleh pemerintah untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan desa melalui pembangunan dalam skala Desa. Pemerintah memberikan kewenangan penuh terhadap aparatur-aparatur desa serta masyarakat desa dalam pelaksanaan program Dana Desa dan penetapan prioritas

penggunaan Dana Desa guna mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Prinsip penggunaan Dana Desa tersebut telah diatur dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, yaitu diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dasar hukum pengelolaan Dana Desa sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Kemudian Menteri Keuangan juga menetapkan Permenkeu Nomor 93/PMK.07 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, penentuan, dan evaluasi Dana Desa.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu dari Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang menerima kucuran dana desa. Kabupaten Brebes terdiri dari 17 Kecamatan dan 297 desa dan setiap desa memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Untuk itu besaran jumlah dana desa di setiap desa yang ada di Kabupaten Brebes pun berbeda.

Pelaksanaan penggunaan Dana Desa harus tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab aparatur-aparatur desa. Dana Desa tersebut harus dialokasikan dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang- Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Potensi masalah yang akan muncul dengan adanya ketidakselarasan antara Dana Desa yang diperoleh di tiap-tiap Desa dengan penggunaan Dana Desa

yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan adanya tindakan kecurangan/penyelewengan di Pemerintah Desa.

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. Ada tiga jenis fraud yakni penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan nampak pada penyajian laporan keuangan (laporan APBDesa) yang dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Potensi kecurangan pengelolaan aset ini, perlu diantisipasi, dikendalikan melalui struktur dan sistem serta dicegah sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Seluruh instansi seharusnya bersama-sama bersinergi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana di Desa, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa dan Pemerintah Kabupaten. Inspektorat sebagai OPD Pemerintah Kabupaten Brebes yang bertugas melaksanakan pengawasan keuangan desa dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa. Beberapa potensi kecurangan khususnya dalam pengelolaan aset perlu diidentifikasi dan dipetakan bersama-sama untuk selanjutnya ditempuh langkah pengendalian untuk meminimalisir potensi tersebut.

Untuk memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan secara tertib, transparan, partisipatif dan akuntabel serta sesuai dengan apa yang telah disusun

dan direncanakan sebelumnya maka perlu pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Peran pengawasan dalam suatu program pembangunan muncul sebagai sarana untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan tersebut telah dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan suatu program pembangunan, pengawasan haruslah melekat didalamnya dalam arti pengawasan merupakan bagian dari aktivitas pelaksanaan program pembangunan itu sendiri.

Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan, yang artinya harus ada sesuatu obyek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan kalau ada rencana program/kegiatan untuk diawasi. Rencana digunakan sebagai standar untuk mengawasi, sehingga tanpa rencana hanya sekedar meraba-raba. Apabila rencana telah ditetapkan dengan tepat dan memulai pengawasannya begitu rencana dilaksanakan, maka tidak ada hal yang menyimpang.

Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan salah satu dari instansi-instansi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan, yang didalamnya pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Berdasarkan Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tahun 2016. Pengawasan Dana Desa menjadi bagian dari pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam ruang lingkup pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5 dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan telah di ubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 004 Tahun 2017 tentang kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017.

Di sebutkan dalam pasal 1 butir 6 Peraturan Bupati Brebes Nomor 004 Tahun 2017 disebutkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah intansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di pemerintah pusat dan /atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Lembaga Pemerintah Non departemen, Inspektorat pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota,dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Fungsi Inspektorat Inspektorat Kabupaten Brebes yang tertuang dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 004 Tahun 2017 pada pasal 3 yaitu pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes yang meliputi :

- a. Pengawasan Umum
- b. Pengawasan Teknis
- c. Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Brebes yang tertuang dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 004 Tahun 2017 pada pasal 1 butir 9, inspektorat sebagai pemeriksa/audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efesiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Jadwal Pemeriksaan Reguler Irban Wilayah II Inspektorat Kabupaten Brebes di Tahun 2018 dengan Wilayah Kerja:

1) Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

Bulan Juni 2018 : Desa Karangpari dan Desa Jipang

Bulan Agustus 2018 : Desa Bantarkawung, Desa Pengabean Kec. Bantarkawung, Desa Waru dan Desa Cinanas

2) Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

Bulan Maret 2018 : Desa Penggarutan, Desa Kaliwadas dan Desa Adisana

3) Kecamatan Losari Kabupaten Brebes

Bulan Januari 2018 : Desa Kalibuntu, Desa Karangsembung, dan Desa Prapag Kidul

Bulan Juli 2018 : Desa Pekauman, Desa Blubuk, Desa Losari Kidul dan Desa Pengabean Kecamatan Losari

4) Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

Bulan Pebruari 2018 : Desa Jubang dan Desa Dukuhlo

5) Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

Bulan April 2018 : Desa Pamedaran, Desa Karangmalang, Desa Dukuhtengah dan Desa Cikeusal Kidul

Bulan Mei 2018 : Desa Jemasih , Desa Ciseureuh

Pemerintah Desa merupakan salah satu wilayah tugas dan fungsi kerja inspektorat dalam pengawasan khususnya pada pengawasan penggunaan dana Desa. Namun sejauh ini, pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes terhadap pengawasan penggunaan Dana Desa masih mendapatkan kritikan dan dinilai *fiktif* oleh Ketua DPRD Kabupaten Brebes. Sebab, Inspektorat Kabupaten Brebes dalam melaksanakan pemeriksaan secara langsung ke desa sekabupaten Brebes tidak dilaksanakan secara menyeluruh, Inspektorat Kabupaten Brebes hanya memeriksa 30% dari 297 Desa yang ada di Kabupaten Brebes. Hal ini sangat berdampak pada masih maraknya kasus penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh aparatur-aparatur desa di kabupaten Brebes. Hal tersebut memperlihatkan keberadaan Inspektorat Kabupaten Brebes sebagai lembaga pengawas yang mengawasi penggunaan Dana Desa pada pelaksanaannya kurang berfungsi secara maksimal.

Disamping itu masih banyaknya kasus yang menjerat di Pemerintahan Desa dalam penggunaan Dana Desa. Didapat dari beberapa sumber yang didapat ada

beberapa kasus yaitu banyaknya aduan kepada Bupati terkait pengelolaan keuangan dan aset desa serta melakukan audit investigasi dari APH (Aparat Penegak Hukum) kasus penyelewengan di :

- Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan (Surat Kapolres Brebes Nomor : B/1503/VI/2018/RES.BBS tanggal 22 Juni 2018 Perihal Permohonan Audit Investigasi Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Desa Sindang Jaya)
- Desa Cipelem Kecamatan Bulakamba (Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Brebes Nomor 140.41/1490 tanggal 10 Agustus 2017 Perihal : Permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Di Desa Cipelem)
- Desa Bulakparen Kecamatan Bulakamba (Surat Kapolres Brebes Nomor : B/251/IX/2017/Reskrim tanggal 13 September 2017 Perihal Permohonan Audit Investigasi Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Desa Bulakparen)
- Desa Siasem Kecamatan Wanasari (Surat KAJARI Brebes nomor B-157/0.3.30.4/FD.1/02/2018 tanggal 8 Pebruari 2018 Perihal Penghitungan Fisik Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Siasem).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHUN 2017 DI KABUPATEN BREBES**

I.2. Rumusan Masalah

Masalah merupakan suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sudah terjadi tentang suatu perihal, atau kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi serta harapan dan kenyataannya. (Notoadmojo) <http://www.pelajaran.co.id/2017/09/pengertian-masalah-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenis-masalah-terlengkap.html>

Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti mengajukan rumusan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam penggunaan Dana Desa?
- b. Kendala apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam penggunaan Dana Desa?
- c. Apa solusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam penggunaan Dana Desa?

I.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah :

- a. Ingin menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes.

- b. Ingin mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes.
- c. Ingin mengetahui solusi di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes.

I.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Bagi Ilmu Pengetahuan, hasil penelitian secara teoritis dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi Inspektorat Brebes dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Inspektorat Kabupaten Brebes sebagai lembaga pengawas sehingga dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa serta sebagai referensi bagi peneliti untuk pengembangan tema dan topik yang sama.
- b. Bagi Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih memperhatikan aturan-aturan dalam penggunaan dana Desa.

- c. Bagi mahasiswa pada umumnya dan khususnya mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, hasil penelitian ini merupakan salah satu persiapan dalam praktik penulisan skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Kerangka Teori

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.

II.1.1. Pengertian Manajemen

Menurut Herujito (2001:2) secara umum pengertian manajemen merupakan pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja.

James A.F Stoner dalam Badrudin (2013:3) menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan pengorganisasian dan penggunaan sumber daya lainnya agar mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut George R. Terry dalam Herujito (2001:3) manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan (*planning*), keorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) yang

dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan pengelolaan suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun fungsi manajemen menurut para ahli berbeda-beda, tetapi dari semua ahli yang mengemukakan tentang fungsi manajemen terdapat kesamaan beberapa fungsi. Henry Fayol dalam Robins dan Coulter (2010:9) mengemukakan lima fungsi manajemen, yaitu:

- a. Perencanaan (*Planning*), merupakan kegiatan mendefinisikan sasaran-sasaran, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana kerja untuk mengelola aktivitas-aktivitas.
- b. Penataan (*Organizing*), merupakan kegiatan menentukan apa yang harus diselesaikan, bagaimana caranya, dan siapa yang akan mengerjakannya.
- c. Kepemimpinan (*Leading*), merupakan memotivasi, memimpin, dan tindakan-tindakan lainnya yang melibatkan interaksi dengan orang-orang lain.
- d. Pengendalian (*Controlling*), merupakan kegiatan mengawasi aktivitas-aktivitas demi memastikan segala sesuatunya terselesaikan sesuai rencana.

Sedangkan Menurut Winardi (2010:7) ciri-ciri dasar fungsi manajemen mencakup hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*Planning*) merupakan dipilihnya arah tindakan atau rencana- rencana yang mengarahkan sumber-sumber daya manusia serta alam sesuatu organisasi untuk masa yang akan datang.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*), mengkombinasi berbagai macam sumber daya manusia menjadi suatu keseluruhan atau kesatuan yang berarti
- c. Pelaksanaan (*Actuating*), mencakup motivasi, kepemimpinan, komunikasi, pelatihan dan bentuk-bentuk pengaruh pribadi lainnya. Fungsi ini juga dianggap sebagai tindakan menginisiasi dan mengarahkan pekerjaan yang perlu dilaksanakan dalam sebuah organisasi.
- d. Pengawasan (*Controlling*), meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar-standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan-tindakan korektif untuk memperbaikinya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ciri dasar fungsi manajemen ialah *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang salah satu fungsi manajemen yaitu pengawasan (*Controlling*) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes terhadap penggunaan Dana Desa.

II.1.2. Pengawasan

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, pemborosan, kebocoran, kemubaziran dan penyelewengan dalam keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan dalam administrasi keuangan daerah.

Secara umum pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pengawasan lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994:21) pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Sedangkan menurut Bohari (1992:4) pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan dan pengontrolan agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya wujud semula.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu pengamatan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan tugas tersebut. Dalam penelitian ini, pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes merupakan suatu bentuk pemeriksaan dan pengontrolan terhadap penggunaan Dana Desa agar penggunaan Dana Desa sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

II.1.2.1. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan apada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

Menurut Bohari (1992:5), tujuan pengawasan yaitu mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pemimpin atau penanggung jawab fungsi atau kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Tujuan utama pengawasan ialah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan daripada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Bohari (1992:6), jika diaplikasikan dengan pengawasan keuangan negara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Obyek dari pengawasan keuangan negara bukan hanya menitikberatkan pada sektor anggaran belanja saja, tetapi juga dari segi anggaran pendapatan negara (pajak/dan penerimaan non pajak).
- b. Pengawasan keuangan negara diartikan sebagai usaha yang bersifat terus-menerus untuk mengetahui apakah aktivitas-aktivitas yang mengakibatkan pengeluaran negara tidak menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan

- c. Maksud dilakukannya pengawasan keuangan negara supaya pengeluaran-pengeluaran negara benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, selain itu dimaksudkan agar penerimaan negara dapat masuk tepat pada waktunya

Lebih lanjut Arifin Abdul Rachman dalam Situmorang dan Juhir (1994:23) mengatakan bahwa maksud dari pengawasan yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar

Oleh karena itu menurut Situmorang dan Juhir (1994:23), pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting terlebih-lebih dalam negara berkembang, karena negara berkembang pembangunan dilaksanakan sangat pesat sedangkan tenaga/personil belum siap mental dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Sehingga mungkin saja terjadi kesalahan-kesalahan, kecurangan-

kecurangan dan kelalaian-kelalaian. Dengan demikian perlu dan sangat penting pengawasan itu diadakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan yaitu mengamati pelaksanaan suatu program agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana, dan terhindar dari segala bentuk penyimpangan. Dalam penelitian ini, pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan dan kegagalan dari pengelolaan Dana Desa sedini mungkin sehingga dapat diantisipasi penyimpangannya dan diarahkan agar penyimpangan tersebut tidak terulang kembali. Sehingga tujuan utama dari pengawasan ini agar segala anggaran yang direncanakan dapat dikelola seefektif mungkin guna mendapatkan hasil yang maksimal.

II.1.2.2. Fungsi Pengawasan

Menurut Adisasmita (2014:136) kebijakan pengawasan dalam dimensi pemerintah dan pembangunan dimaksudkan agar segenap rangkaian pelaksanaan dan mekanisme pembangunan dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pemikiran dan pertimbangan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Menurut Achmadi (2005:80) Pengawasan anggaran dilakukan berdasarkan motivasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Juga bersifat pencegahan secara dini terhadap kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan dan pelanggaran.

Menurut Djayasinga (2008:27) Fungsi pengawasan anggaran ialah:

1. Menjamin ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Mendorong terciptanya efesiensi dan efektivitas.
3. Menjamin pelaporan yang diberikan dapat dipercaya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan memiliki fungsi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dalam penelitian ini fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes terhadap penggunaan Dana Desa ialah untuk menjamin ditaatinya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam penggunaan Dana Desa, mendorong terciptanya efesiensi dan efektivitas dalam penggunaan Dana Desa, menjamin pelaporan yang diberikan dan rencana yang telah ditetapkan sesuai dan dapat dipercaya.

II.1.2.3. Jenis-Jenis Pengawasan

II.1.2.3.1. Jenis Pengawasan menurut Subyek

Dilihat dari subyeknya, Diharna dalam bukunya *Pemeriksaan dalam Pengawasan*, membedakan pengawasan menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen

2. Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional
3. Pengawasan Legislatif
4. Pengawasan Masyarakat
5. Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (Diharna, 1999:11)

Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen merupakan pengawasan yang berjalan secara otomatis yang terbentuk oleh sistem kerja dan apabila mendapatkan kesalahan, pelaksana/pimpinan satuan kerja langsung melakukan koreksi; bahkan berusaha mencegah terjadinya kesalahan. Pengawasan ini terjadi dengan adanya saling pengendalian atau saling melakukan pengawasan antar bagian dalam proses pelaksanaan karena diciptakannya “*tanding procedure*” dalam mekanisme kerja. Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa dalam institusi pengawasan yang hasil pemeriksaannya berupa rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan atau perbaikan perencanaan. Aparat pemeriksa fungsional mempunyai norma pemeriksanaan sendiri. Pengawasan Legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat biasanya dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana, kebijaksanaan, peraturan, dan menyoroti pula cara pelaksanaan. Pengawasan Masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat masyarakat, biasanya menyoroti kerugian atau terganggunya kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, atau masyarakatnya. Sedangkan pengawasan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan indikator tumbuhnya masyarakat madani, yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga ini mempunyai kedudukan yang makin kuat dalam

ikut mengatur kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi lembaga yang mendominasi pengaturan kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya terdapat beberapa macam pengawasan yang dikemukakan oleh, para ahli, ditinjau dari beberapa segi. Menurut Sujamto, dari subyeknya pengawasan terbagi atas pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal (Sujamto) adalah: “Pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi), baik yang bersifat intern dan ekstern”. Contohnya ialah pengawasan oleh BPK atau Inspektorat Jenderal terhadap instansi-instansi atau pejabat-pejabat atau proyek-proyek pemerintah. Sementara pengawasan informal menurut Sujamto, ialah: “Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Baik langsung maupun tidak langsung”.

II.1.2.3.2. Jenis Pengawasan Menurut Obyek

Jenis pengawasan menurut obyeknya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung didefinisikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan tersebut (on the spot). Sistem ini disebut pula sebagai “built of control.” (Sujamto, 1996:14)

Sedangkan pengawasan tidak langsung didefinisikan Sujamto sebagai: “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/pimpinan organisasi tanpa mendatangi obyek yang diawasi/diperiksa.” (Sujamto, 1996:14) Lazimnya, aparat/pimpinan

yang melakukan pengawasan ini berdasarkan laporan yang tiba kepadanya dengan mempelajari dan menganalisa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diawasi.

II.1.2.3.3. Jenis Pengawasan Menurut Sifat dan Waktu

Jenis pengawasan menurut sifat atau waktu menurut Handyaningrat dapat dibedakan menjadi: pengawasan preventif dan pengawasan refresif.” (Handyaningrat, 1986:145-146)

Pengawasan preventif diartikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan, atau disebut pula sebagai pre-audit dalam system pemeriksaan anggaran.” (Handyaningrat, 1986:145) Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur,
- b. hubungan, dan tata kerjanya.
- c. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah
- d. ditetapkan.
- e. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya.
- f. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai, dan
- g. pembagian pekerjaannya.
- h. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.

- i. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. (Handyaningrat, 1986:145)

Sedangkan pengawasan represif diartikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.” (Handyaningrat, 1986:145) Maksudnya adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini dapat menggunakan 4 sistem pengawasan, yaitu: “Komperatif, Verifikatif, Insektif, atau Investigatif.” (Handyaningrat, 1986:145-146)

II.1.2.3.4. Jenis Pengawasan Menurut Ruang Lingkupnya

Jenis pengawasan menurut ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: “Pengawasan dari dalam (*internal control*) dan pengawasan dari luar (*eksternal control*).” (Handyaningrat, 1986:144)

Pengawasan dari dalam (*internal control*) berarti: “Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat/Unit Pengawasan yang terbentuk di dalam organisasi itu sendiri.” (Handyaningrat, 1986:144) Aparat/Unit Pengawasan ini bertindak atas nama Pimpinan Organisasi yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. data-data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya

pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan (korektif) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.

Sedangkan pengawasan dari luar (*eksternal control*) diartikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi.” (Handyaningrat, 1986:144) Aparat/unit pengawasan merupakan aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya.

II.1.2.4. Tahap-Tahap dalam Proses Pengawasan

Menurut Effendi (2014:230) tahapan-tahapan dalam proses pengawasan yaitu:

- a. Penetapan standar pelaksanaan, karena standar merupakan suatu pengukuran yang digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Ada tiga bentuk standar yang secara umum digunakan dalam manajemen, yaitu standar-standar fisik, standar-standar moneter, dan standar-standar waktu.
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali dan dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan serta siapa saja yang terlibat dalam pengukuran tersebut.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu melalui, pengamatan, laporan-

laporan, metode- metode otomatis, serta inspeksi pengujian dengan mengambil sampel.

- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, maksudnya adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini kemungkinan terdapat penyimpangan-penyimpangan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan.
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

II.1.2.5. Ciri-ciri Pengawasan yang Efektif

Dalam melakukan pengawasan sangatlah perlu untuk dilakukan secara efektif sehingga dapat tercipta efektifitas pengawasan yang baik. Menurut Handoko (2000:373) untuk menjadi efektif, sistem dalam pengawasan harus memenuhi beberapa karakteristik-karakteristik sebagaimana pengawasan yang efektif, dan kriteria pengawasan yang efektif tersebut ialah sebagai berikut:

1. Akurat, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu, informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3. Objektif dan menyeluruh, bahwa informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
8. Fleksibel, pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Kemudian Siagian dalam bukunya fungsi-fungsi manajerial (2005:130) mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan yang efektif merupakan salah satu refleksi dari efektivitas manajerial seorang pemimpin. Untuk melaksanakan pengawasan diperlukan tersedianya suatu sistem informasi yang andal agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya benar-benar terlaksana sesuai dengan hal-hal yang telah ditetapkan. Penyediaan informasi tidaklah selalu mudah karena agar benar-benar bermanfaat dalam pelaksanaan pengawasan, informasi tersebut bukan saja harus dapat dipercaya, mutakhir, dan terolah dengan rapi, tetapi sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki ciri sebagai berikut :

1. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Yang dimaksud ialah bahwa teknik pengawasan harus sesuai, antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut. Dalam teknik pengawasan ada hal-hal yang berlaku bagi semua jenis organisasi, misalnya anggaran yang dialokasikan, standar waktu penyelesaian tugas, standar biaya, serta pemanfaatan sumber daya manusia.
2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana. Pengawasan harus mampu mendeteksi deviasi atau

penyimpangan yang mungkin terjadi sebelum penyimpangan itu menjadi kenyataan. Usaha deteksi seperti itu harus dilakukan sedini mungkin dan informasi tentang hasil tentang deteksi itu harus segera tiba ditangna manajer secara fungsional bertanggung jawab agar ia segera dapat mengambill tindakan pencegahannya.

3. Pengawasan harus menunjukan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu. Karena banyaknya kegiatan yang harus dilakukan, manajer harus mampu menentukan kegiatan apa yang perlu dilakukan sendiri dan kegiatan apa yang seharusnya didelegasikan kepada orang lain.
4. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Terdapat kriteria dalam standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh para pelaksana kegiatan operasional. Kriteria demikian bermakna apabila para pelaksana mengetahui, memahami dan menerima kriteria tersebut. Dengan adanya kriteria tersebut, pengawasan dapat dilaksanakan dengan objektif. Dampak positif dari adanya kriteria yang jelas demikian dipandang dari kaca mata para bawahan ialah bahwa bagi mereka lebih mudah menerima hasil pengawasan yang dilakukan.
5. Keluwesan pengawasan. Salah satu konsekuensi adanya rencana yang fleksibel ialah bahwa pengawasan pun harus bersifat fleksibel pula. Fleksibilitas berarti bahwa pelaksanaan pengawasan harus tetap bisa berlangsung meskipun organisasi menghaapi perubahan karena timbulnya keadaan yang tidak diduga sebelumnya. Dengan demikian penyesuaian-

penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

6. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi. Pola dasar dan tipe organisasi tertentu ditetapkan dalam mana tertampung berbagai hal seperti pembagian tugas, pendelegasian wewenang, pola pertanggungjawaban, jalur komunikasi dan jaringan informasi. Semua ini harus diperhatikan dalam pengawasan.
7. Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dilaksanakan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakain tinggi. Oleh karena itu pengawasan sendiri harus diselenggarakan dengan tingkat efisiensi tinggi pula.
8. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. Sistem pengawasan dewasa ini banyak digunakan dan dikembangkan berbagai teknik untuk membantu para manajer melakukan pengawasan seperti dengan menggunakan rumus matematika, bagan-bagan yang rumit, analisis yang terinci, atau data statistik. Akan tetapi tidak semua manajer memahami terlatih untuk menggunakan teknik-teknik canggih tersebut. Bagi yang bertugas selaku pengawas, perlu menentukan teknik pengawasan bagaimana yang dibutuhkannya, dan alat bantu apa yang dikuasainya.
9. Pengawasan mencari apa yang tidak beres. Pengawasan yang baik harus menemukan siapa yang salah dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut.

10. Pengawasan harus bersifat membimbing. Jika telah ditemukan ada yang tidak beres dan siapa yang salah serta telah diketahui pula faktor-faktor penyebabnya. Kelemahan dan kesalahan bawahan hanya bisa dikoreksi apabila manajer yang bersangkutan relatif bebas dari kelemahan dan kesalahan yang sama.

Berdasarkan karakteristik diatas dapat diketahui bahwa pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang merefleksikan sifat dari kegiatan yang sedang diselenggarakan, pengawasan tersebut dapat memberikan petunjuk tentang kemungkinan dari adanya kesalahan atau penyimpangan yang terjadi agar kesalahan tersebut dapat diantisipasi, dan apabila sudah terjadi maka dapat diketahui penyebabnya agar tidak terulang lagi sehingga kegiatan yang dilakukan tepat guna dan tujuan dari perencanaan dapat dicapai.

II.1.2.6. Teknik-teknik dalam Pengawasan

Siagian dalam bukunya fungsi-fungsi manajerial (2005:192) mengatakan bahwa jenis apapun pekerjaan senantiasa memerlukan suatu teknik atau cara yang tepat sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan jumlah atau kuantitas yang telah diharapkan dan memiliki kualitas atau mutu berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Tata nilai dalam kehidupan kelembagaan senantiasa berorientasi pada masa yang akan datang, disinilah pentingnya peranan teknik-teknik pengawasan agar tata nilai dalam kehidupan kelembagaan dapat terpelihara

dengan baik dalam melaksanakan aktivitas anggota kelembagaan menaati tata nilai tersebut.

1. Teknik pemantauan dalam pengawasan.

Salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung.

2. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan.

Tidak ada pengawasan tanpa melakukan pemeriksaan karena dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran. Memang masalah pemeriksaan ini kadang dilakukan secara subjektif karena yang diperiksa terdapat ikatan akrab sehingga kesalahan direkayasa menjadi suatu kebenaran.

3. Teknik penilaian dalam pengawasan.

Teknik penilaian sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tentunya harus dilakukan secara tepat, adil, dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran, karena penilaian yang salah akan berakibat negatif bagi unsur pelaksanaan kegiatan.

4. Teknik wawancara dalam pengawasan.

Salah satu teknik pelaksanaan pengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsung pelaksaannya suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang objek dari suatu pengawasan yang dilakukan. Tujuan wawancara dari suatu pengawasan adalah dalam rangka memperoleh informasi sehingga pengawas bisa menentukan suatu keyakinan kebenaran pelaksanaan suatu kegiatan.

5. Teknik pengamatan dalam pengawasan.

Teknik pengawasan lainnya adalah dengan melalui pengamatan yang harus dilakukan secermat mungkin sehingga apa yang diamati dapat memberikan informasi tentang keadaan yang sesungguhnya mengenai kegiatan tersebut.

6. Teknik perhitungan dalam pengawasan.

Perhitungan sangat memegang peranan penting dalam pengawasan karena salah satu teknik untuk menentukan dari pada hasil pengawasan, kekeliruan dalam perhitungan berarti kesalahan hasil dalam pengawasan.

7. Teknik analisis dalam pengawasan.

Setiap data dan informasi yang diterima dari kegiatan pengawasan harus dilakukan analisis untuk menentukan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan unit kerja teknis sehingga dapat memberikan suatu kepastian terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Teknik analisis dalam pengawasan merupakan suatu hal yang menentukan kebenaran

penyajian hasil dari pada pengawasan, kekeliruan penyajian hasil pengawasan lebih banyak disebabkan oleh teknik analisis yang digunakan.

8. Teknik pelaporan dalam pengawasan.

Setiap pelaksanaan kegiatan dalam berbagai kelembagaan selalu memberikan laporan pelaksanaan suatu pekerjaan yang diberikannya kepada pejabat yang memberikan kewenangan tersebut. Laporan ini merupakan suatu objek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah pengawasan hanya mempercayai laporan saja, karena terkadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya.

Teknik-teknik pengawasan tidak selamanya cocok dari seluruh kegiatan dalam kelembagaan karena jenis pekerjaan yang dilakukan setiap unit kerja berbeda sifatnya dan teknik pengawasan yang harus digunakan disesuaikan dengan jenis pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang bersangkutan.

II.1.3. Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 menyatakan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Widjaja (2003:3) Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati setempat.

Tujuan Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003:14-15) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya pemerintahan desa antara lain:

- 1) Penyeragaman Pemerintahan Desa
- 2) Belum terlaksana sepenuhnya, masih berkisar pada sumbangan-sumbangan desa.
- 3) Memperkuat Pemerintahan Desa
- 4) Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan digerakkan dari “atas” tidak berasal dari “bawah”.
- 5) Masyarakat digerakkan secara mobilisasi
- 6) Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh dari yang diharapkan khususnya Sumber Daya Manusi (SDM).
- 7) Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).

Menurut Rozali (2005:170) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa ialah:

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;

- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten /kota, yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota;
- 4) Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

II.1.4. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap

Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

II.1.4.1. Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2015 disebutkan juga bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa harus memenuhi empat prioritas utama. Keempat prioritas utama penggunaan Dana Desa yaitu; pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, maka prioritas penggunaan Dana Desa yaitu; pengembangan pos kesehatan

Desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Penggunaan Dana Desa untuk prioritas penggunaan Sarana dan Prasarana Desa harus mendukung target pembangunan sektor unggulan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan. Target yang diprioritaskan yaitu mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan mendukung pariwisata dan industri. Untuk sarana dan prasarana didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, yang sejalan dengan pencapaian target dalam RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana antara lain, pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan embung Desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan. Selanjutnya untuk pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, dan pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Penggunaan Dana Desa juga harus diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi. Penggunaan Dana Desa untuk

pemberdayaan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas proses perencanaan Desa, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya, pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penggunaan dana desa harus mampu meningkatkan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

II.1.5. Inspektorat

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:41-44) Inspektorat Jenderal merupakan pengawas fungsional di tingkat Departemen yang berada langsung dibawah Menteri yang berfungsi untuk membantu Menteri dalam rangka pengawasan umum terhadap segala aspek pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab Menteri. Tugas pokok Inspektorat Jenderal ialah melakukan pengawasan dalam lingkungan departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsure departemen agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, baik tugas yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.

Selanjutnya mengenai Inspektorat Wilayah Provinsi merupakan perangkat pengawas umum yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam kedudukannya selaku Kepala Wilayah Provinsi. Adapun aparat pengawas fungsional yang paling rendah tingkatannya adalah Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah perangkat pengawas umum yang diperbantukan kepada Bupati/Walikota dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah Kabupaten/Kota, yang taktis operasional langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan teknis administrative bertanggung jawab kepada Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi.

Inspektorat Kabupaten Brebes sebagai lembaga pengawas internal pemerintahan daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 35 Tahun 2013. Pada bab II pasal 3 dinyatakan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah Kabupaten Brebes, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa. Sedangkan fungsi Inspektorat Kabupaten Brebes adalah:

- a. Perencanaan Program Pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan

Sedangkan dalam hal pengawasan penggunaan Dana Desa, Inspektorat Kabupaten Brebes sebagai pengawas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Uraian Kegiatan Kebijakan Pengawasan di

Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 dalam ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

II.2. Definisi Konsep

Konsep merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi. Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial (Singarimbun dalam Nasution, 2001:15). Suatu konsep ada kalanya mempunyai pengertian yang berbeda dan mempunyai variabel yang berbeda pula terutama dalam ilmu sosial. Hal ini disebabkan penggunaan suatu konsep dikaitkan dengan hal atau situasi yang berbeda. Agar tidak menimbulkan kekaburan pengertian, kiranya perlu ditegaskan batasan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

Definisi konsep pada penelitian yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes, sebagai berikut :

1. Pengawasan merupakan suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pengawasan lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Pengawasan diartikan juga suatu bentuk pemeriksaan dan pengontrolan agar apa yang

telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya wujud semula.

2. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah perangkat pengawas umum yang diperbantukan kepada Bupati/Walikota dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah Kabupaten/Kota, yang taktis operasional langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi. Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintahan daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah.
3. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya.

II.3. Pokok – Pokok Penelitian

Pokok-pokok penelitian adalah tahapan dimana penulis menjabarkan konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur. Definisi operasional atau pokok-pokok penelitian berfungsi untuk menjelaskan ukuran atau indikator-indikator penelitian agar data yang diperoleh lebih konkret.

Guna memastikan penggunaan Dana Desa berjalan secara tertib, transparan, partisipatif dan akuntabel serta sesuai dengan apa yang sudah disusun dan direncanakan sebelumnya maka perlu pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa tersebut. Salah satu instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa ialah Inspektorat. Berdasarkan Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tahun 2016, pengawasan Dana Desa menjadi bagian dari pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam ruang lingkup pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

1. Tugas dan fungsi Pengawasan Inspektorat dengan indicator :

- a. SOP Pengawasan
- b. Perencanaan
- c. Sumber Daya Manusia
- d. Pemeriksaan/audit
- e. Reviu
- f. Monitoring/pemantauan

- g. Evaluasi
- h. Pengujian
- i. Penilaian
- j. pengusutan

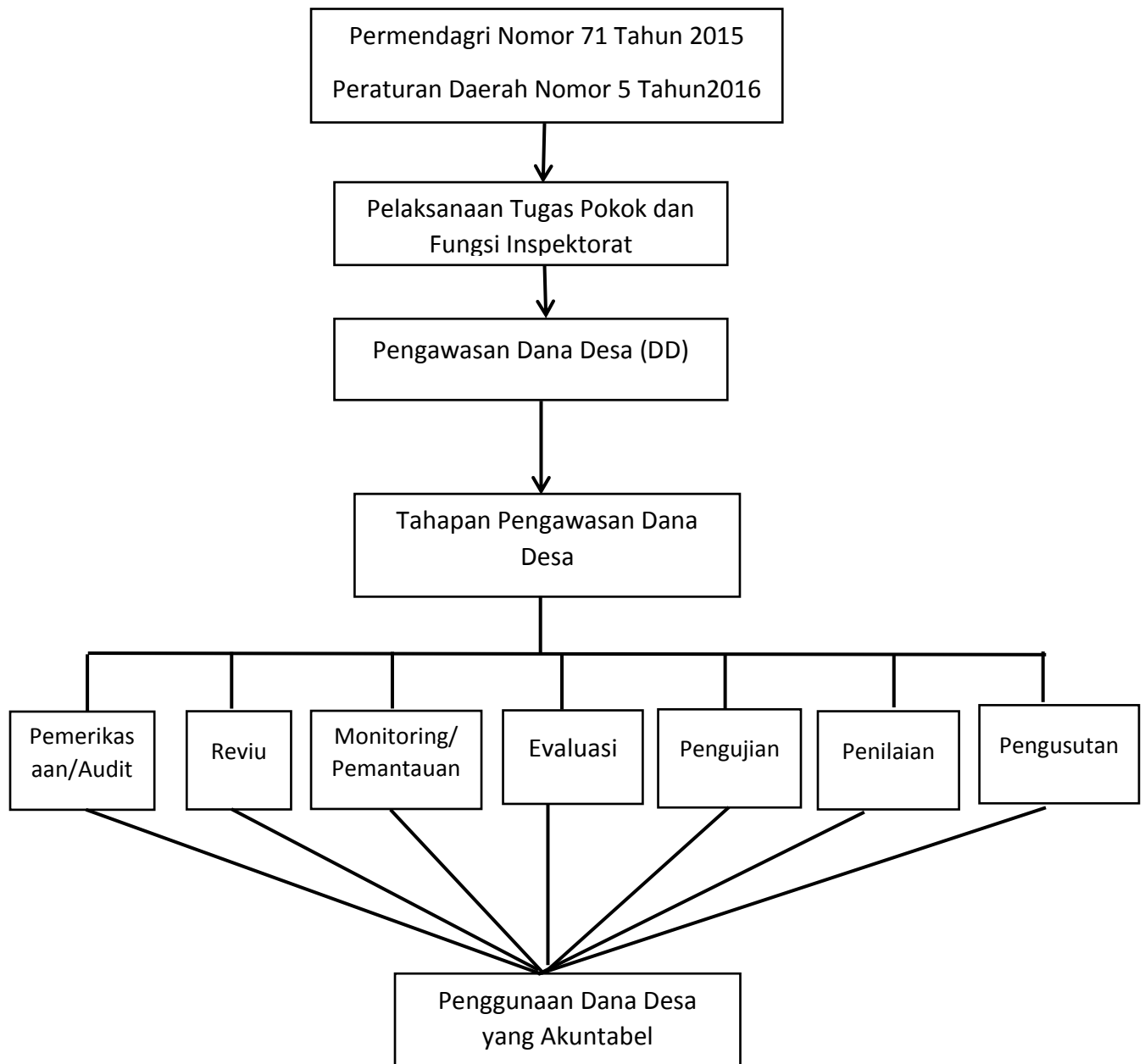
2. Indikator pengelolaan Dana Desa adalah :

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai :

- a. Penyelenggaran pemerintahan,
- b. Pembangunan
- c. Pemberdayaan masyarakat
- d. kemasyarakatan.

II.4. Alur Pikir

Alur pikir dalam penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 2.1
Alur Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dipahami sebagai suatu cara dalam upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, serta memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah. Dengan metode penelitian, pekerjaan penelitian akan lebih terarah, sebab metode penelitian bermaksud memberikan kemudahan dan kejelasan tentang apa dan bagaimana peneliti melakukan penelitian. Oleh karena itu dalam bab tiga ini akan diuraikan mengenai berbagai hal yang termasuk dalam metode penelitian.

III.1 Tipe Penelitian.

Masri Singarimbun (2008:23) berpendapat bahwa penelitian pada umumnya dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) tipe, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penelitian Penjajakan

Penelitian ini bersifat terbuka, masih mencari-cari data belum mempunyai hipotesis. Pengetahuan penelitian tentang gejala yang akan diteliti masih kurang atau sedikit sekali. Penelitian yang dilakukan sebagai langkah penelitian pertama untuk penelitian yang mendalam, baik penjelasan maupun deskriptif.

2. Penelitian Penjelasan (Eksplanator)

Penelitian penjelasan meyoroti hubungan antara Variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu dinamakan pula penelitian pengujian hipotesis atau *testing research*. Walaupun uraiannya juga mengandung deskripsi, tetapi sebagai penelitian rasional fokusnya terletak pada penjelasan hubungan variabel.

3. Penelitian Deskriptif

Penelitian ini mempunyai tujuan yang pertama untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu, yang kedua adalah mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Dalam penelitian ini dideskripsikan secara kualitatif mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes.

Dari ketiga tipe penelitian diatas maka penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan yang ketiga, yaitu tipe penelitian deskriptif atau menggambarkan yang merupakan penelitian non hipotesis, karena penulis ingin mendeskripsikan data-data secara naratif mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes.

III.2. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data, namun terdapat dua macam data dalam penelitian yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut Sugiyono

(2015:7) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan/skoring.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya akan lebih banyak berkaitan dengan narasi kata serta kalimat dari informan mengenai interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan yaitu tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes.

2. Sumber Data

Dijelaskan oleh Lofland (1984) dalam Moleong (2014:157) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan pengertian ini maka sumber data mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes yang merupakan temuan hasil wawancara (deskripsi kata-kalimat) dari orang-orang yang mengetahui tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dan juga mengetahui Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes.

Pencatatan sumber data utama mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes melalui wawancara atau pengamatan yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar dan terarah. Terarah karena memang dari berbagai macam informasi yang tersedia

mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes tidak seluruhnya akan digali oleh peneliti. Artinya senantiasa memiliki tujuan, maksudnya peneliti mempunyai seperangkat tujuan penelitian yang diharapkan dicapai untuk memecahkan masalah penelitian yaitu Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes.

III.3. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2014:91) Informan adalah orang dalam pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia “berkewajiban” secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.

Persyaratan yang diperlukan dalam memilih dan menentukan seorang informan adalah ia harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau tentang peristiwa yang terjadi. Pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau, jadi sebagai *internal sampling*, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya.

Usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara: (1) melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintahan) maupun

informal (orang/badan, masyarakat seperti tokoh masyarakat). Perlu dijajaki jangan sampai terjadi informan yang disodorkan itu berperan ganda, misalnya sebagai pegawai Dinas terkait dan sebagai informan pembantu peneliti, yang mungkin juga ditugaskan memata-matai peneliti; (2) melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang

Urban wilayah II : Wiryawan Hadi, S.H. : 1 orang

2. Ketua tim : Adi Susanto, S.T. : 1 orang

3. Anggota Tim : Ema Kusuma D, S.IP, M.Si : 1 orang

4. Kepala Desa Sindangjaya : Samsul Arif : 1 orang

5. Ketua TPK Dana

Desa Sindangjaya : Kasid : 1 orang

6. Kepala Desa Ciomas : Abdul Rochim : 1 orang

7. Ketua TPK Dana

Desa Ciomas : Holid : 1 orang

8. Pendamping Desa : Sihit Nurtanto, A.Md : 1 orang

Jumlah : 8 orang

III.4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa sumber, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang nampak itu disebut dengan data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti (Widoyoko, 2012:46).

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes .

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) dipahami sebagai dialog secara lisan (tanya jawab) antara pewawancara dengan orang lain yang diinterviu. Lazim dalam wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara. Menurut Widoyoko (2012:40) “ *wawancara merupakan carang pengumpulan data yang langsung dari sumbernya tentang berbagai gejala sosial, baik yang terpendam (latent) maupun tampak*’.

a. Dasar Pemanfaatan Wawancara

Penggunaan wawancara sebagai metode prngumpulan data dalam penelitian didasarkan pada anggapan antara lain :

- 1) Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri

- 2) Bahwa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan yang dimaksudkan oleh peneliti (Hadi dalam Widoyoko, 2012:40).

Dalam penelitian ini, wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes . Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang pada dasarnya mencakup Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes. Hasil wawancara dapat terekam dengan baik, apabila peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan, atau sumber data, sehingga diperlukan bantuan alat-alat antara lain:

- (1) buku catatan, yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer jenis *notebook* yang dapat digunakann untuk membantu mencatat hasil wawancara, (2) tape recorder, berfungsi untuk merekam semua percakapan pembicaraan. Penggunaan tape recorder dalam wawancara memberi tahu kenapa informan apakah dibolehkan atau tidak, (3) camera, untuk memotret kalau peneliti sedangmelakukan pembicaraan dengan informan. Dengan adanya foto ini, maka dapat

meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2012:328).

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dipahami sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hal ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain (Sugiyono, 2012:329).

4. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Sugiyono (2011:240) Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, tau karya-karya monumental dari seseorang. Dari pendapat ini penulis menyimpulkan dokumen merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari atau mencatat dari dokumen dokumen dan arsip yang berhubungan dengan objek penelitian.

III.5. Teknik dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan,

menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian, antara lain:

1. Analisis sebelum dilapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan (Sugiyono, 2012: 90).

2. Analisis selama di lapangan model Miles and Huberman

Mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication* (Sugiyono, 2012: 91).

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya (Sugiyono, 2012: 92).

- b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dengan penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya

(Sugiyono, 2012: 95).

c. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2012: 99). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum lokasi penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Disisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes Tahun 2017.

IV.1. Deskripsi Kabupaten Brebes

IV.1.1. Keadaan Geografis Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes terletak di bagian Utara paling Barat Provinsi Jawa Tengah, di antara koordinat $108^{\circ} 41'37,7''$ - $109^{\circ} 11'28,92''$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 44'56'5''$ - $7^{\circ} 20'51,48$ Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penduduk Kabupaten Brebes mayoritas menggunakan bahasa Jawa yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, biasanya disebut dengan Bahasa Jawa Brebes. Namun terdapat Kenyataan pula bahwa sebagian penduduk Kabupaten Brebes juga bertutur dalam bahasa Sunda dan banyak nama tempat yang

dinamai dengan bahasa Sunda menunjukkan bahwa pada masa lalu wilayah ini adalah bagian dari wilayah Sunda. Daerah yang masyarakatnya sebagian besar menggunakan bahasa Sunda atau biasa disebut dengan Bahasa Sunda Brebes, adalah meliputi Kecamatan Salem, Banjarharjo, dan Bantarkawung, dan sebagian lagi ada di beberapa Desa di Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Ketanggungan dan Larangan.

Ibu kota kabupaten Brebes terletak di bagian timur laut wilayah kabupaten. Kota Brebes bersebelahan dengan Kota Tegal, sehingga kedua kota ini dapat dikatakan "menyatu".

Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Bagian barat daya merupakan dataran tinggi (dengan puncaknya Gunung Pojoktiga dan Gunung Kumbang), sedangkan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet.

Dengan iklim tropis, curah hujan rata-rata 18,94 mm per bulan. Kondisi itu menjadikan kawasan tersebut sangat potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti tanaman padi, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan sebagainya.

Batas wilayah Kabupaten Brebes :

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah selatan : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap

Sebelah barat : Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan (Jawa Barat)

Sebelah timur : Kabupaten Tegal, Kota Tegal

IV.1.2. Luas Wilayah Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes mempunyai luas wilayah sebesar 1.662,96 km², terdiri dari 17 Kecamatan dan 297 desa/kelurahan. Kecamatan Bantarkawung merupakan Kecamatan terluas dengan luas wilayah 205 km², sedangkan luas wilayah Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Jatibarang dengan luas 35,18 km². Wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan sebagian besar terletak di daratan tinggi, sedangkan wilayah bagian utara terletak di daerah daratan rendah, wilayah Kecamatan tertinggi adalah Kecamatan Sirampog dengan ketinggian 875 m.

Menurut penggunaan tanah dibagi menjadi tanah sawah dan tanah bukan sawah. Berdasarkan Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) pada Tahun 2014, luas tanah sawah sebesar 627,03 km² (37,70%) dan luas tanah bukan sawah sebesar 1.035,93 km² (62,30%). Sebagian besar luas tanah sawah merupakan sawah berpengairan 46.087 Ha (73,50%), baik merupakan irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana maupun irigasi desa, sedangkan sisanya (26,50%) merupakan sawah tadah hujan.

Jumlah curah hujan rata-rata di Kabupaten Brebes pada tahun 2016 sebesar 2.882 mm, rata-rata jumlah curah hujan per bulan 240 mm sedangkan jumlah rata-rata hari hujan per bulan pada tahun 2016 adalah 14 hari. Curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Larangan sebesar 4.904

mm, sedangkan jumlah hari hujan terbanyak adalah 274 hari terjadi di Kecamatan Bumiayu.

IV.1.3. Keadaan Demografi Kependudukan Kabupaten Brebes

Jumlah penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2016 tercatat 1.788,880 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan. Dengan seks rasio sebesar 101,00. Yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Secara absolut, masing-masing jumlahnya adalah 898.877 penduduk laki-laki, dan 890.003 penduduk perempuan.

Tiga Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Bulakamba 169.542 jiwa (9,55 persen), Kecamatan Brebes 160.050 jiwa (8,94 persen), dan Kecamatan Wanasari sebanyak 149.644 jiwa (8,46 persen). Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Kersana sebanyak 59.027 jiwa atau (3,28 persen). Namun jika dilihat dari tingkat kepadatannya, dimana luas daerah ikut diperhitungkan, Kecamatan Jatibarang menempati urutan pertama sebagai kecamatan yang paling padat penduduknya di Kabupaten Brebes, dimana kepadatan penduduknya 2.443penduduk/Km² yang berarti bahwatiap 1 Km² ditempati 2.443 penduduk. Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah ditempati oleh Kecamatan Salem, dimana kepadatan penduduknya

hanya 393 penduduk/Km² yang berarti bahwa tiap 1 Km² hanya ditempati 393 penduduk.

Tabel IV.1
Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Setiap Kecamatan di Kabupaten Brebes

Kecamatan	Percentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
1. Salem	3.44	393
2. Bantarkawung	98	435
3. Bumiayu	5.48	1330
4. Paguyangan	5.62	957
5. Sirampog	3.58	955
6. Tonjong	3.71	818
7. Larangan	7.81	849
8. Ketanggungan	7.69	923
9. Banjarharjo	6.80	967
10. Losari	6.85	1371
11. Tanjung	5.36	1415
12. Kersana	3.30	2340
13. Bulakamba	9.48	1647
14. Wanasari	8.37	2010
15. Songgom	3.89	1420
16. Jatibarang	4.80	2443
17. brebes	8.95	1977
Kabupaten Brebes	100.00	1076

Sumber : Badan Pusat StatistiK Kabupaten Brebes Dalam Angka Tahun 2017

Tabel IV.2
Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di
Kabupaten Brebes

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4 Tahun	76.928	72.875	149.803
5-9 Tahun	80.240	76.091	156.331
10-14 Tahun	85.277	80.853	166.130
15-19 Tahun	87.897	77.379	165.276
20-24 Tahun	78.586	69.676	148.262
25-29 Tahun	67.610	64.872	132.482
30-34 Tahun	64.184	64.964	129.148
35-39 Tahun	65.050	65.370	130.420
40-44 Tahun	57.918	57.982	115.900
45-49 Tahun	53.569	55.661	109.230
50-54 Tahun	49.026	53.420	102.446
55-59 Tahun	42.973	45.522	88.495
60-64 Tahun	37.382	37.159	74.541
65 Tahun Keatas	52.237	68.179	120.416
Jumlah	898.877	890.003	1.788.880

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes Dalam Angka Tahun 2017

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk yang masih remaja cukup banyak, adalah pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu dengan jumlah laki-laki 87.897 jiwa dan perempuan 80.853 jiwa pada kelompok umur 10-14 tahun. Terdapat pula jumlah penduduk yang termasuk usia produktif berusia 20-24 tahun yang yaitu dengan jumlah laki-laki 78.586 jiwa dan perempuan 69.676 jiwa.

IV.2. Gambaran Inspektorat Kabupaten Brebes

IV.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Brebes

Inspektorat sebagai OPD yang memiliki peranan strategis memiliki tanggung jawab yang besar. Untuk itu dalam rangka pelaksanaan tugas sehari – hari, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, Inspektur Kabupaten Brebes dibantu oleh :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Inspektur dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan inspektorat. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam pengelolaan keuangan, penyusunan program dan pelaporan inspektorat,

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan, mengolah dan menginventarisir laporan Hasil pengawasan.

4. Sub Bagian Administrasi dan Umum

Sub bagian administrasi dan umum mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan tata laksana rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian inspektorat.

5. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja yaitu :

- Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes ;
- Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes;
- Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Brebes;
- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Brebes;
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes;
- Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
- Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes;

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes;
- Kecamatan Salem Kabupaten Brebes termasuk desa - desa se Wilayah kecamatan Salem;
- Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes termasuk desa - desa se Wilayah kecamatan Kersana;
- Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes termasuk Desa - desa se wilayah kecamatan Tanjung;
- Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes termasuk desa - desa se Wilayah kecamatan Banjarharjo;
- BLUD UPTD Puskesmas Tanjung Kabupaten Brebes;
- BLUD UPTD Puskesmas Banjarharjo Kabupaten Brebes;
- UPTD Pendidikan Salem Kabupaten Brebes termasuk sekolah - sekolah yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan Salem;
- UPTD Pendidikan Kersana Kabupaten Brebes termasuk sekolah - sekolah yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan Kersana;
- UPTD Pendidikan Tanjung Kabupaten Brebes termasuk sekolah
 - sekolah yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan Tanjung;

- UPTD Pendidikan Banjarharjo Kabupaten Brebes termasuk sekolah - sekolah yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan Banjarharjo

6. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja yaitu :

- 6) Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Brebes;
- 7) Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Brebes;
- 8) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes;
- 9) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes;
- 10) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Brebes;
- 11) Dinas Perikanan Kabupaten Brebes;
- 12) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes;
- 13) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 14) Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes termasuk desa - desa se Wilayah kecamatan Banjarharjo;
- 15) Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes termasuk desa - desa se Wilayah kecamatan Banjarharjo;

- 16) Kecamatan Losari Kabupaten Brebes termasuk desa - desa se Wilayah kecamatan Losari;
- 17) Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes termasuk desa - desa se Wilayah kecamatan Bulakamba;
- 18) Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes termasuk desa - desa se Wilayah kecamatan Ketanggungan;
- 19) BLUD UPTD Puskesmas Bumiayu Kabupaten Brebes;
- 20) UPTD Pendidikan Bantarkawung Kabupaten Brebes termasuk sekolah - sekolah yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan Bantarkawung;
- 21) UPTD Pendidikan Bumiayu Kabupaten Brebes termasuk sekolah – sekolah yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan Bumiayu;
- 22) UPTD Pendidikan Losari Kabupaten Brebes termasuk sekolah – sekolah yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan Losari;
- 23) UPTD Pendidikan Bulakamba Kabupaten Brebes termasuk sekolah – sekolah yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan Bulakamba;
- 24) UPTD Pendidikan Ketanggungan Kabupaten Brebes termasuk sekolah- sekolah yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan Ketanggungan;

25) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (BKK) Brebes

7. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja yaitu :

- Bagian Umum Setda Kabupaten Brebes;
- Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Brebes;
- Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes;
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Brebes;
- Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
- Dinas Sosial Kabupaten Brebes;
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes;
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes;
- Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Brebes;
- Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes termasuk desa - desa se Wilayah kecamatan Sirampog;
- Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes termasuk desa - desa se Wilayah kecamatan Tonjong;

- Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes termasuk desa - desa se Wilayah kecamatan Jatibarang;
- Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes termasuk desa - desa se Wilayah kecamatan Brebes;
- BLUD UPTD Puskesmas Brebes Kabupaten Brebes;
- Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes;
- Balai Pengobatan Parudan Kusta Kabupaten Brebes;
- UPTD Pendidikan Sirampog Kabupaten Brebes termasuk sekolah
 - sekolah yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan Sirampog;
- UPTD Pendidikan Tonjong Kabupaten Brebes termasuk sekolah
 - sekolah yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan Tonjong;
- UPTD Pendidikan Jatibarang Kabupaten Brebes termasuk sekolah - sekolah yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan Jatibarang;
- UPTD Pendidikan Brebes Kabupaten Brebes termasuk sekolah - sekolah yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan Brebes

8. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja yaitu :

- Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Brebes;
- Bagian Penanggulangan Kemiskinan Setda Kabupaten Brebes;
- Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga;
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes;
- Dinas Pengelolaan Pendapatan , Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes;
- Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
- Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes;
- Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes;
- Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
- BLUD UPTD Puskesmas Paguyangan Kabupaten Brebes;
- BLUD UPTD RSUD Brebes Kabupaten Brebes;
- BLUD UPTD RSUD Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Perusda PDAM Kabupaten Brebes;

- UPTD Pendidikan Paguyangan Kabupaten Brebes termasuk sekolah – sekolah yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan Paguyangan;
- UPTD Pendidikan Wanasari Kabupaten Brebes termasuk sekolah – sekolah yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan Wanasari;
- UPTD Pendidikan Songgom Kabupaten Brebes termasuk sekolah
 - sekolah yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan Songgom;
- UPTD Pendidikan Larangan Kabupaten Brebe termasuk sekolah
 - sekolah yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan Larangan

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian seperti auditor dan P2UPD.

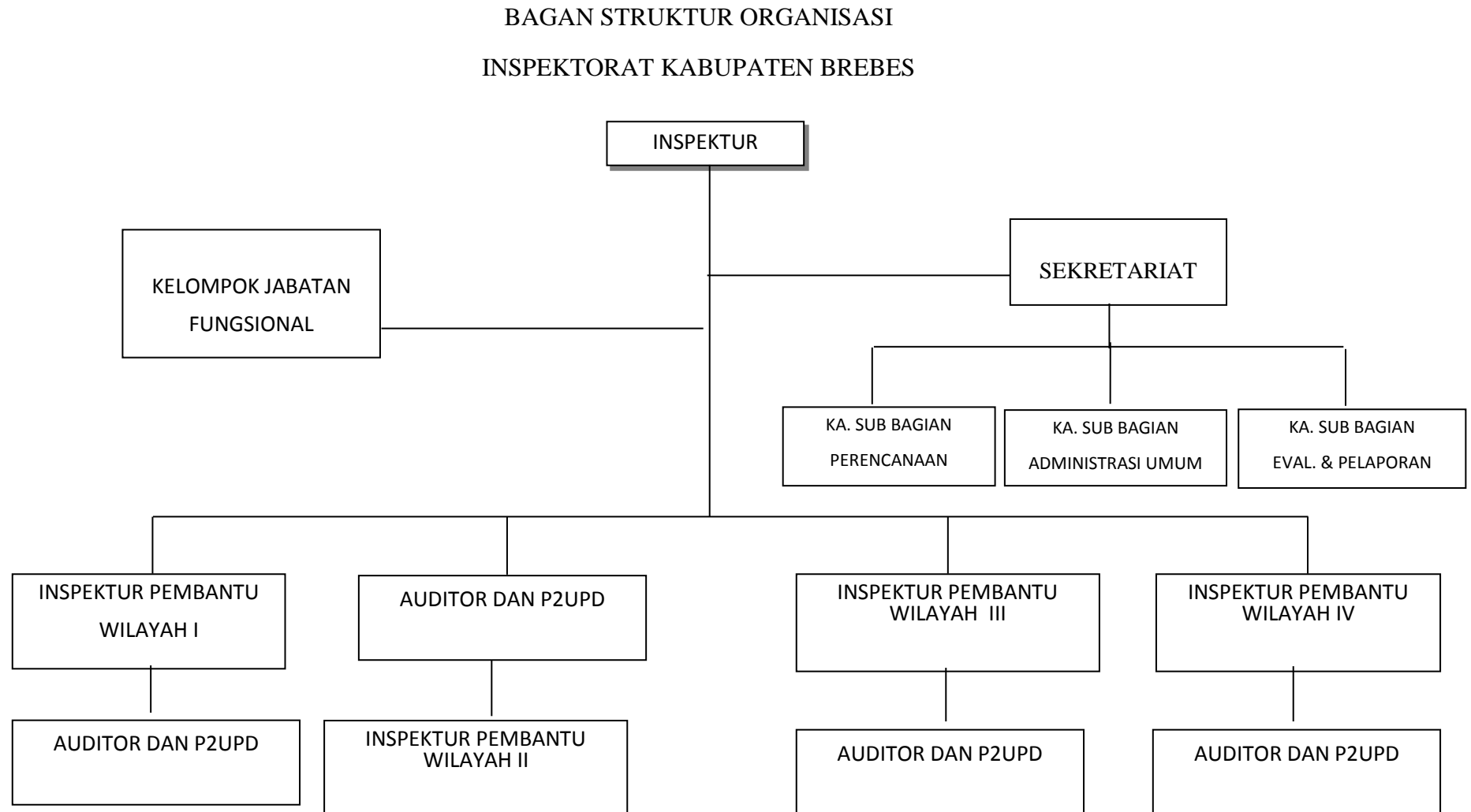
IV.2.2. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Brebes

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Brebes sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes

(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5) , adapun Susunan Organisasi Inspektorat secara lengkap adalah sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 2.1. Sub Bagian Perencanaan ;
 - 2.2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2.3. Sub Bagian Administrasi Umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II ;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III ;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar IV.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Brebes



Sumber : Rentra Inspektorat Kabupaten Brebes 2017-2022

IV.2.3. Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Brebes

Sumber Daya Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Brebes dapat dilihat berdasarkan data kepegawaian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan Ruang:

Adapun keadaan pegawai menurut Golongan ruang adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3. Keadaan Pegawai menurut Golongan Ruang

No.	Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Ket
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	6	-
3.	Golongan III	29	-
4.	Golongan IV	8	-
	Jumlah	43	-

Sumber : Renstra Inspektorat Kabupaten Brebes 2017 - 2022

2. Berdasarkan Pendidikan:

Berdasarkan klasifikasi pendidikan, komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Brebes dapat dirinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.4. Keadaan Pegawai menurut Pendidikan

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	-
2.	SLTP	-
3.	SMU/SMK	10
4.	Sarjana Muda/D3	1
5.	Sarjana	28
6.	Pasca Sarjana	4
	J u m l a h	43

Sumber : Renstra Inspektorat Kabupaten Brebes 2017 - 2022

3. Berdasarkan Jabatan :

Berdasarkan Jabatan , komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Brebes dapat dirinci sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel IV.5. Keadaan Pegawai menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II.b	1
2.	Eselon III.a	5
3.	Eselon IV.a	3
4.	Jabatan Fungsional Auditor	14
5.	Staf	20
	J u m l a h	43

Sumber : Renstra Inspektorat Kabupaten Brebes 2017 - 2022

IV.2.4. Sarana Prasarana / Asset / Modal

Tabel. IV.6. Keadaan Aset Inspektorat Kabupaten Brebes

Aset	Jumlah	Keadaan		
		Baik	Rusak	Rusak berat
Tanah dan gedung	1	1		
Kendaraan Dinas Roda Empat	6	6	—	—
Kendaraan Dinas Roda Dua	17	17	—	—
Komputer	20	20	—	—
Printer	16	16	—	—
CPU	22	22	—	—
Laptop	14	14	—	—
Server	3	3	—	—
LCD	2	2	—	—
Layar Monitor	1	1	—	—
AC Ruangan	10	10	—	—
Faksimile	1	1	—	—
Televisi	2	2	—	—
Handycam	1	1	—	—
Central Telepon	1	1	—	—
Pesawat Telpon Display	1	1	—	—
Pesawat telepon single line	15	15	—	—
Kipas Angin	12	12	—	—
Tape Recorder	2	2	—	—
Meja kursi eselon II	1	1	—	—
Meja kursi eselon II	1	1	—	—
Meja kursi eselon III	6	6	—	—
Meja kursi eselon IV	19	19	—	—

Lemari kayu/Bufet	1	1	—	—
Lemari Es	1	1	—	—
Almari Arsip	12	12	—	—
Lemari Kayu	8	8	—	—
Lemari Kaca	1	1	—	—
Kursi Kayu	33	33	—	—
Kursi Lipat	70	70	—	—
Meja Tulis	34	34	—	—
Meja Makan	1	1	—	—
Papan Visual	5	5	—	—
Papan PNS	1	1	—	—
White Board	2	2	—	—
Filling Kayu	6	6	—	—
Filling Besi	6	6	—	—
Rak Besi	1	1	—	—
Mesin Tik	6	6	—	—
Cash Box	1	1	—	—

Sumber : Renstra Inspektorat Kabupaten Brebes 2017-2022

IV.2.5. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten

Brebes :

1. Tujuan

Tujuan yaitu sesuatu yang hendak dicapai oleh organisasi dalam menjalankan kegiatannya sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis serta harus dapat menjawab permasalahan dan menangani isu strategis yang

muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Tujuan pada pengawasan adalah untuk mendukung pencapaian Misi ke empat RPJMD yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang professional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. Tujuan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 adalah Meningkatkan penguatan peran pengawasan Internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat kabupaten Brebes, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu :

- a. Tercapainya nilai 3 Maturitas APIP;
- b. Tercapainya Level 3 penuh Kapabilitas APIP.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1. Hasil Penelitian

Penggunaan Dana Desa harus berjalan secara tertib, transparan, partisipatif dan akuntabel. Agar Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan apa yang sudah disusun dan direncanakan dan bisa di kelola dengan efektif dan efesien yang dapat dirasakan manfaatnya yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, Maka perlu adanya pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Salah satu instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa ialah Inspektorat. Berdasarkan Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tahun 2016, pengawasan Dana Desa menjadi bagian dari pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam ruang lingkup pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Penggunaan Dana Desa tahun 2017 di Kabupaten Brebes, peneliti telah mewancarai informan-informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat dalam pengaawasan Dana Desa sebagai berikut :

Informan dalam penelitian ini adalah :

9. Kepala Bidang Irban wilayah II : Wiryawan Hadi, S.H.

(wawancara pada tanggal 5 Nopember 2019)

10. Ketua tim : Adi Susanto, S.T.

(wawancara pada tanggal 11 Nopember 2019)

11. Anggota Tim : Ema Kusuma D, S.IP, M.Si

(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

12. Kepala Desa Sindangjaya : Samsul Arif

(wawancara pada tanggal 19 Nopember)

13. Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya : Kasid

(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

14. Kepala Desa Ciomas : Abdul Rochim

(wawancara tanggal 21 Nopember 2019)

15. Ketua TPK Dana Desa Ciomas : Holid

(wawancara tanggal 21 Nopember 2019)

16. Pendamping Desa : Sihit Nurtanto, A.Md

(wawancara tanggal 27 Nopember 2019)

Hasil wawancara mengenai Tugas dan fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Brebes :

a. SOP Pengawasan

a. Apakah ada SOP Pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Ada, melekat dalam SOP Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus yang tertuang dalam peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, di situ memuat SOP yang harus dilaksanakan Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pengawasan ” (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Ya ada mas, kami dalam menjalankan tugas pengawasan selalu menggunakan SOP yang di atur dalam peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. SOP ini kan penting yang salah satu tujuan adanya SOP menjadi pedoman dalam melaksanakan pekerjaan sebagai auditor sehingga tidak menyimpang dari yang telah distandarkan ” (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Jelas ada toh mas, SOP itu kan penting sebagai pijakan kami selaku inspektorat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. SOP audit/pengawasan di atur dalam peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ” (wawancara tanggal 13 Nopember 2019)

Dari hasil wawancara terhadap informan dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Brebes menggunakan SOP dalam menjalankan tugas pengawasan Dana Desa yang digunakan setiap Desa di Kabupaten Brebes. SOP yang digunakan mengacu dalam peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- b. Siapa yang membuat SOP pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh Inspektorat Brebes?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ yang membuat SOP adalah MENPAN karena SOP audit tertuang dalam Peraturan Menteri yang ditindaklanjuti oleh Bupati Brebes dalam PERBUP no 001 tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.” (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim, menyatakan :

“SOP dibuat ditingkat menteri dalam hal ini yaitu MENPAN dan dilaksanakan oleh Bupati Brebes dalam PERBUP no 001 tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.” (wawancara pada tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ ya mas yang membuat SOP adalah MENPAN kami hanya melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang sudah ada.” (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Dari jawaban yang diberikan oleh informan bahwa SOP yang di gunakan inspektorat Brebes mengacu pada Menpan. Ini berarti SOP pengawasan yang membuat dari orang-orang di tingkat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan).

c. Seperti apa SOP pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh Inspektorat Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Standar Audit atau yang dikenal SOP yang dilaksanakan oleh Inspektorat ada beberapa tahapan/prosedur yang dilakukan yaitu : Prosedur persiapan dan perencanaan pengawasan (penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dn alokasi sumber daya),

Supervisi, Pengumpulan dan pengajuan bukti, pengembangan temuan dan dokumentasi.” (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Senada apa yang dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim menjawab :

“SOP yang dilaksanakan oleh Inspektorat meliputi : Prosedur persiapan dan perencanaan pengawasan (penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dn alokasi sumber daya), Supervisi, Pengumpulan dan pengajuan bukti, pengembangan temuan dan dokumentasi.” (wawancara pada tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“sesuai dengan pedoman yang ada SOP Inspektorat meliputi : Prosedur persiapan dan perencanaan pengawasan (penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dn alokasi sumber daya), Supervisi, Pengumpulan dan pengajuan bukti, pengembangan temuan dan dokumentasi.” (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Hasil wawancara tentang SOP pengaawasan Inspektorat dengan informan dapat disimpulkan bahwa SOP pengawasan meliputi Prosedur persiapan dan perencanaan pengawasan (penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya), Supervisi, Pengumpulan dan pengajuan bukti, pengembangan temuan dan dokumentasi.

- d. Apakah pegawai Inspektorat Brebes mengetahui SOP Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes.

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Cara pegawai Inspektorat Brebes mengetahui SOP Pengawasan Dana Desa yaitu dengan melalui Sosialisasi dan House Training (PKS) yang di adakan oleh Inspektorat Provinsi maupun pusat “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim menjawab :

“ biasanya seperti itu mas.... melalui Sosialisasi dan House Training (PKS)” (wawancara pada tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Untuk mengetahui SOP Pengawasan Dana Desa yaitu pegawai inspektorat Brebes mengikuti Sosialisasi dan House Training (PKS) yang di adakan oleh Inspektorat Provinsi maupun pusat “ (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

- Kesimpulan dari hasil wawancara tentang pengetahuan pegawai terkait SOP pengawasan adalah bahwa semua pegawai inspektorat Brebes mengetahui SOP pengawasan yang berlaku. Untuk lebih mendalami SOP pengawasan pegawai inspektorat Brebes mengikuti Sosialisasi dan House Training (PKS) yang di adakan oleh Inspektorat Provinsi maupun pusat. Sehingga kinerja pegawai Inspektorat terhadap pengawasan Dana Desa dikerjakan dengan baik.
- e. Pertanyaan tentang apakah Inspektorat Brebes selalu menggunakan SOP dalam melakukan pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ tentunya selalu memakai SOP.... Karena SOP merupakan standar kami untuk melaksanakan tugas..” (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ iya mas...selalu menggunakan SOP sebagai dasar petunjuk teknis yang ada “(wawancara pada tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ kami bekerja selalu berpedoman pada SOP atau peraturan teknis yang ada “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Kesimpulan dari jawaban informan menyatakan bahwa inspektorat Brebes dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya selalu menggunakan standar audit yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara terhadap informan mengenai SOP pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam pengawasan Dana Desa dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Brebes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu mengacu SOP yang ada. SOP terdiri dari Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus yang tertuang dalam peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dalam peraturan tersebut juga memuat kewajiban-kewajiban dan tahapan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat. Untuk lebih mendalami SOP pengawasan dan pemeriksaan tersebut, para pegawai inspektorat melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan House Trainning (PKS) yang di adakan oleh Inspektorat Provinsi maupun pusat. Serta selalu dilakukan kegiatan koordinasi internal seluruh jajaran Inspektorat Brebes sebelum melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan ke Desa-Desa.

2. Perencanaan

- a. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah ada perencanaan yang dilakukan inspektorat Brebes sebelum melakukan pengawasan pada pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ ya tentu ada mas.....Pelajari aturan main, Resiko/hambatan dan metode pengawasan” (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ ada yakni dengan penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)” (wawancara pada tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ ya ada...yakni dengan mempelajari aturan yang ada dan dengan metode-metodenya “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Dari jawaban informan dapat disimpulkan bahwa inspektorat Brebes melakukan perencanaan sebelum melaksanakan tugas. Perencanaan dilakukan dengan penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan).

- b. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, kapan perencanaan dilakukan oleh inspektorat Brebes pada pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“Sebelum tahun anggaran pelaksanaan pengawasan (PKPT) “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ sebelum berakhirnya tahun anggaran “(wawancara pada tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ sebelum berakhirnya tahun anggaran (sekitar bulan September – oktober) membahas RKPT” (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara yaitu bahwa perencanaan dilaksanakan sebelum tahun anggaran pelaksanaan pengawasan (PKPT). PKPT dilaksanakan biasanya pada bulan September-Oktober.

- c. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, siapa sajakah yang masuk dalam tim perencanaan inspektorat Brebes sebelum melakukan pengawasan pada pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“yang masuk dalam tim perencanaan adalah Inspektur, Sekretaris dan Bidang Wilayah” (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ inspektur, kesekretariatan yakni Ka. SubBag Perencanaan Inspektorat Kabupaten dan Irban Wilayah “ (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Irban Wilayah, ketua tim pemeriksaan, Sekretariatan, Kasubag Perncanaan dan Inspektur “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Dari jawaban informan diketahui bahwa yang membuat perencanaan pengawasan adalah Irban Wilayah, ketua tim pemeriksaan, Sekretariat, Kasubag Perencanaan dan Inspektur.

- d. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana perencanaan yang dilakukan inspektorat Brebes sebelum melakukan pengawasan pada pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Dengan membuat jadwal tahunan (PKPT) kecuali kasus dan khusus yang berisi rencana kegiatan audit dalam tahun yang bersangkutan serta sumber daya yang diperlukan. Penentuan prioritas kegiatan audit didasarkan pada evaluasi risiko yang dilakukan oleh APIP dan dengan mempertimbangkan prinsip kewajiban menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat...penyusunan rencana pengawasan tahunan tersebut di dasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan yang berulang-ulang serta memperhatikan efesiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang ada.... “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ perencanaannya sudah cukup memadai karena adanya PKPT yang telah dibuat “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ rencana pengawasan cukup dengan mendasar pada sumberdaya yang ada dengan menyusun PKPT “ (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“memberi tahu akan adanya pemeriksaan dengan mengirim surat dan pada saat pemeriksaan sebelumnya melakukan pembukuan pemeriksaan dengan menyampaikan maksud dan tujuannya agar menyiapkan data dan personil yang berkaitan dengan tugasnya “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perencanaan dilakukan dengan membuat jadwal tahunan (PKPT) kecuali kasus dan khusus yang berisi rencana kegiatan audit dalam tahun yang bersangkutan serta sumber daya yang diperlukan. Penentuan prioritas kegiatan audit didasarkan pada evaluasi risiko yang dilakukan oleh APIP dan dengan mempertimbangkan prinsip kewajiban menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat Penyusunan rencana pengawasan tahunan tersebut di dasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan yang berulang-ulang serta memperhatikan efesiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang ada.

- e. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Apa saja yang dilakukan inspektorat Brebes dalam perencanaan pengawasan pada pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Membuat jadwal dan persiapan pengawasan rencana kegiatan audit dalam tahun yang bersangkutan serta sumber daya yang diperlukan. Penentuan prioritas kegiatan audit didasarkan pada evaluasi risiko yang dilakukan oleh APIP dan dengan mempertimbangkan prinsip kewajiban menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat, mengkomunikasikan dan meminta persetujuan Rencana Pengawasan Tahunan, pengelolaan sumberdaya, menetapkan kebijakan dan prosedur, melakukan koordinasi, dan nantinya menyampaikan laporan berkala mengenai realisasi kinerja dan kegiatan audit yang telah dilaksanakan” (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“menyusun program kerja pengawasan Tahunan (PKPT) yang merupakan jadwal dan persiapan pengawasan rencana kegiatan audit

dalam tahun yang bersangkutan “ (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“menyusun program kerja pengawasan Tahunan (PKPT) “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Terkait dengan apa saja yang dilakukan dalam perencanaan pengawasan dapat disimpulkan tim inspektorat membuat jadwal dan persiapan pengawasan rencana kegiatan audit dalam tahun yang bersangkutan serta sumber daya yang diperlukan. Penentuan prioritas kegiatan audit didasarkan pada evaluasi risiko yang dilakukan oleh APIP dan dengan mempertimbangkan prinsip kewajiban menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat, mengkomunikasikan dan meminta persetujuan Rencana Pengawasan Tahunan, pengelolaan sumberdaya, menetapkan kebijakan dan prosedur, melakukan koordinasi, dan nantinya menyampaikan laporan berkala mengenai realisasi kinerja dan kegiatan audit yang telah dilaksanakan.

Dari hasil wawancara terhadap informan dapat disimpulkan bahwa sebelum Inspektorat melakukan pengawasan dan pemeriksaan penggunaan Dana Desa dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Proses Perencanaan dengan membuat jadwal dan persiapan pengawasan rencana kegiatan audit dalam tahun yang bersangkutan yang disebut program kerja pengawasan Tahunan (PKPT), serta menetapkan sumber daya yang diperlukan. Penentuan prioritas kegiatan audit didasarkan pada evaluasi risiko yang dilakukan oleh APIP dan dengan mempertimbangkan prinsip kewajiban menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat, mengkomunikasikan dan meminta persetujuan Rencana

Pengawasan Tahunan, pengelolaan sumberdaya, menetapkan kebijakan dan prosedur, melakukan koordinasi, dan nantinya menyampaikan laporan berkala mengenai realisasi kinerja dan kegiatan audit yang telah dilaksanakan

3. Sumber Daya Manusia

- a. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Berapa jumlah pegawai inspektorat kabupaten brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Jumlahnya 54 Orang pegawai. yang melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan Dana Desa dibagi dalam beberapa kelompok/tim....yang disebut Irban wilayah. Masing masing tim berjumlah 7-8 orang. Inspektroat Brebes mempunyai 4 tim yang tugasnya sesuai dengan wilayah masing masing.. “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“pegawai inspektorat Brebes seluruhnya berjumlah 54 orang, itu dari kepala sampai staff..” (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“jumlahnya 54 orang mas....”(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Dari penuturan informan dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang merupakan sumber daya manusia inspektorat adalah 54 orang. Yang terdiri dari kepala inspektorat sampai staf-stafnya.

- b. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Apakah jumlah pegawai inspektorat Brebes mencukupi untuk melaksanakan tugas pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ dengan jumlah 54 orang pegawai Belum Cukup mas...dibandingkan dengan jumlah beban kerja yang sangat banyak. Desa di Brebes aja sampai 292 desa... “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“jumlah desa sebanyak 292, sedangkan tim pemeriksa hanya 5 orang , sehingga kami hanya melakukan pengawasan regular yaitu 2 sampai dengan 3 tahun sekali. Jadi dengan jumlah pegawai yang ada sangat kurang sekali/belum memadai dalam melakukan pengawasan “ (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“belum memadai mas....dalam pelaksanaan pengawasan kami mengawasi 292 desa, sedangkan jumlah tim pemeriksa hanya 5 orang ..ya sangat belum memadai Mas..” (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang ada berjumlah 54 belum mencukupi untuk inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan Dana Desa secara maksimal.

- c. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana tingkat pendidikan pegawai inspektorat kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ tingkat pendidikan pegawai cukup lumayan tinggiSMA = 20 Orang, D.3 = 1 Orang , S.1 = 29 Orang dan S.2 = 4 Orang, tapi perlu adanya dorongan bagi yang SMA untuk melanjutkan S 1 nya ..ini untuk menambah kompetensi pegawai “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“dari 54 orang pegawai.....pendidikannya pegawai inspektorat Brebes dari SMA sampai S2.. SMA = 20 Orang, D.3 = 1 Orang , S.1 = 29 Orang dan S.2 = 4 Orang” (wawancara pada tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ tingkat pendidikan pegawai inspektorat dari SMA sampai dengan S2..rinciannya SMA = 20 Orang, D.3 = 1 Orang , S.1 = 29 Orang dan S.2 = 4 Orang” (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Dari keterangan informan tingkat pendidikan pegawai inspektorat Brebes terdiri dari S2 dampapai SMA. Dengan rincian SMA = 20 Orang, D.3 = 1 Orang , S.1 = 29 Orang dan S.2 = 4 Orang.

- d. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana pembagian tugas inspektorat dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa di kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“pembagian Tugas Inspektorat Brebes di distribusikan ke Bidang / Wilayah dengan diatur oleh Ketua Tim “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“pembagian Tugas Inspektorat Brebes dibagi menjadi 4 Irban Wilayah dan masing-masing Irban 4 kecamatan, hanya Irban Wilayah 4 yang mencakup 5 kecamatan “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab seperti yang dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T :

“pembagian Tugas Inspektorat Brebes dibagi menjadi 4 Irban Wilayah 1 s/d 4, masing – masing 1 tim pemeriksaan kecuali Irban wilayah 4 memiliki 2 tim Pemeriksa. (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Pembagian tugas pegawai inspektorat dilakukan dengan membagi menjadi 4 (empat) tim yang disebut Inspektur Pembantu Wilayah. Masing – masing tim beranggotakan 5-6 orang. Satu tim mencakup tugas di 4 kecamatan, hanya satu tim yang mendapat tugas 5 kecamatan yaitu Irban wilayah 4.

- e. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana akuntabilitas/tanggungjawab pegawai dalam menjalankan tugas pengawasan pengelolaan dana desa di kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ akuntabilitasnya Sangat Baik, kegiatan pemeriksaan dan pengawasan dana desa dari mulai menyusun perencanaan sampai pelaporan kami susun sesuai prosedur dan kami laporkan secara berkala. Kegiatan yang merupakan kewajiban kami laksanakan sebaik-baiknya sesuai SOP yang berlaku....” (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ kegiatan pemeriksaan dan pengawasan dana desa dari mulai menyusun perencanaan sampai pelaporan kami susun sesuai prosedur dan kami laporkan secara berkala. Kegiatan yang merupakan kewajiban kami laksanakan sebaik-baiknya sesuai SOP yang berlaku...” (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ semua kegiatan audit yang dilakukan pegawai inspektorat Brebes sesuai dengan aturan yang berlaku...mengenai jadwal pemeriksaan juga tepat waktu sesuai target yang ditentukan, kami juga tidak memungut biaya apapun kepada pihak desa...kegiatan audit dilaksanakan sesuai SOP

yang berlaku...sehingga akuntabilitasnya baik dan terjaga” (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Akuntabilitasa pegawai inspektorat Brebes cukup baik, kegiatan pemeriksaan dan pengawasan dana desa dari mulai menyusun perencanaan sampai pelaporan disusun sesuai prosedur dan dilaporkan secara berkala. Jadwal pemeriksaan juga tepat waktu sesuai target yang ditentukan, tidak memungut biaya apapun kepada pihak desa

Dari hasil wawancara terhadap informan mengenai sumber daya manusia yang ada di inspektorat Brebes dapat disimpulkan bahwa pegawai Inspektorat Brebes berjumlahnya 54 Orang pegawai. Pelaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan Dana Desa dibagi dalam beberapa kelompok/tim yang terbagi empat tim yang disebut Irban wilayah. Masing masing tim berjumlah 7-8 orang yang bertugasnya di wilayah masing masing. Tingkat pendidikan pegawai pegawai Inspektorat Brebes yaitu SMA = 20 Orang, D.3 = 1 Orang , S.1 = 29 Orang dan S.2 = 4 Orang. Perbandingan antara auditor dari empat tim Irban yang bertugas pemeriksaan penggunaan Dana Desa dengan jumlah desa yang diperiksa sebanyak 292 tentunya tidak sebanding, sehingga Inspektorat Brebes hanya melakukan pengawasan regular yaitu 2 sampai dengan 3 tahun sekali di setiap desa.

Akuntabilitas pegawai inspektorat cukup baik ini ditunjukan dengan pelaksanaan kegiatan audit yang dilakukan pegawai inspektorat Brebes sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. Pemeriksaandan pengawasan juga tepat waktu sesuai target yang ditentukan, dalam menjalankan tugas pemeriksaan dan pengawasan tidak memungut biaya apapun kepada pihak desa.

4. Pemeriksaan/audit

- a. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ jelas ada mas...itukan kewenangan yang sudah melekat pada Tupoksi Inspektorat untuk mengaudit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efesiensi dan efektifitas .seperti halnya pengelolaan pemerintah desa yang menggunakan anggaran Dana Desa, jadi harus ada pemeriksaan/audit...dan itu kami laksanakan. Pemeriksaan itu pemeriksaan regular dan dan pemeriksaan kasus/khusus “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ada mas... yaitu pemeriksanan regular dan pemeriksaan kasus/khusus “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ada mas...sudah menjadi Tupoksi Inspektorat untuk seperti halnya pengelolaan pemerintah desa yang menggunakan anggaran Dana Desa, jadi harus ada pemeriksaan/audit...dan itu kami laksanakan. Pemeriksaan itu pemeriksaan regular dan dan pemeriksaan kasus/khusus “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ada mas...yaitu pemeriksaan yang dilakukan 2 atau 3 tahu sekali mereka Inspektorat kesini, da nada pemeriksaan khusus..jika ada aduan dari masyarakat tentang penyelewengan dana desa...korupsi “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ada mas...cuman jarang tidak setiap tahun mereka memeriksa ke sini(des), terus yang aya tahu kalo ada kasus penyalahgunaan anggaran/korupsi terus diadukan oleh masyarakat ke inspektorat...nanti mereka (inspektorat) ya ke desa untuk dilakukan pemeriksaan “ (wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“ ya ada mas....tiga tahun sekali” (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“ ada mas....”(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ ya ada mas....”(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Dari wawancara yang dilaksanakan dihasilkan jawaban bahwa pegawai inspektorat melaksanakan pemerinksaan dana desa di setiap desa di kabupaten Brebes. Baik pemeriksaan regular maupun pemeriksaan kasus/khusus.

- b. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Kapan Pemeriksaan/audit dilakukan oleh Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Secara perodik yang diatur dalam jadwal (PKPT) kecuali kasus yang akan dilakukan secara langsung tanpa melihat jadwal “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ pelaksanaan pemeriksaan/audit sesuai dengan jadwal yang ada pada PKPT” (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ sudah diatur dalam jadwal (PKPT) kecuali kasus yang akan dilakukan secara langsung tanpa melihat jadwal“(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ ketika adanya aduan dari masyarakat adanya korupsi /penyelewengan dana desa dan pemeriksaan yang dilakukan secara regular yaitu 2 atau 3 tahun sekali “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ saat ada aduan dari masyarakat inspektorat turun dan pemeriksaan yang dilaksanakan 2 atau 3 tahun sekali“(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“ sekurang kurangnya 2 atau 3 tahun sekali ada audit “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab:

“ ada pemeriksaan di desa kami 3 tahun sekali “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ pemeriksaannya 2 atau 3 tahun sekali mas...kecuali ada kasus korupsi, mereka rutin ke desa...”(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan/audit oleh inspektorat dilaksanakan secara periodik yang diatur dalam jadwal (PKPT) kecuali kasus yang akan dilakukan secara langsung

tanpa melihat jadwal. Pada pemeriksaan regular di lakukan 2-3 tahun sekali di tiap Desa yang ada di Kabupaten Brebes.

- c. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana Pemeriksaan/audit yang dilakukan Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Profesional, Independen dan Akuntabel sesuai dengan SOP yang ada....pemeriksaan yang menyeluruh dan detail dari penggunaan Dana Desa sehingga diharapkan dana desa dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan tanpa ada korupsi/penyelewengan dana desa“(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ agar pemanfaatan dana desa dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ pemeriksaan/audit dilakukan inspektorat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran hasil pekerjaan serta laporan pertanggungjawabannya. Itu semua dilakukan dan sesuai dengan SOP yang berlaku....“ (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ detail dan menyeluruh ...” (wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ sangat detail sekali “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“ sangat detail dan menyeluruh mas....”(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“ inspektorat memeriksa dari perencanaan, peng SPJ an, pelaporan dan memeriksa fisik lapangan “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ pemeriksaan / audit yang dilakukan inspektorat sudah memadai dan representatif baik secara administrasi dan dalam pelaksanaan maupun lapangan “(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa Pemeriksaan Dana Desa dilakukan oleh inspektorat dengan diawali dari perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran hasil pekerjaan serta laporan pertanggungjawabannya. Itu semua dilakukan dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

- d. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Apa saja yang dilakukan Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“Melaksanakan pengawasan, sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut. “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Mencermati dokumen-dokumen (dari RAB, gambar dan dokumen pengadaan), Membandingkan antara rencana dan realisasi pelaksanaan, Melakukan koreksi terhadap hal-hal yang kurang tepat, Memberikan pendampingan dengan membuka ruang seluasnya bagi Perangkat Desa /

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa (DD) untuk bertanya / konsultasi.” (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Prosedur pengadaan barang / jasa apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pengelolaan anggaran, Kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan, Laporan pertanggung jawaban “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

- *Melakukan infestigasi berkaitan Dana Desa*
 - *Meminta data-data yang berkaitan Dana Desa dari RAB, gambar dan dokumen pengadaan*
 - *Mengecek SPJ dan kelengkapannya*
 - *Mengecek fisik pengadaan barang*
 - *Melakukan pengukuran volume pekerjaan*
- (wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)*

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas dan Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ yang dilakukan Inspektoert adalah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ ya mas yang dilakukan yaitu Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan “

(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan dalam pemeriksaan adalah Mencermati dokumen-dokumen (dari RAB, gambar dan dokumen pengadaan), Membandingkan antara rencana dan realisasi pelaksanaan, Melakukan koreksi terhadap hal-hal yang kurang tepat, Memberikan pendampingan dengan membuka ruang seluasnya bagi Perangkat Desa / Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa (DD) untuk bertanya / konsultasi.

- e. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Apakah ada standar operasional prosedur dalam pemeriksaan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes oleh Inspektorat Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Ada “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ ya ada SOP nya mas... ”(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Standar Operasional pengelolaan Dana Desa (DD) telah diatur dengan Surat Keputusan Inspektur dalam SOP pemeriksaan regular dan SOP pemeriksaan kasus/khusus dengan tujuan tertentu.” (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ Ada mas... “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai kegiatan pemeriksaan / audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Brebes dapat disimpulkan bahwa

inspektorat Brebes melaksanakan pemeriksaan / audit penggunaan Dana Desa di Desa se Kabupaten Brebes yaitu pemeriksaan regular dan pemeriksaan kasus/khusus. Pemeriksaan dilakukan Secara periodik yang diatur dalam jadwal (PKPT) kecuali kasus yang akan dilakukan secara langsung tanpa melihat jadwal. Pemeriksaan regular dilaksanakan 2 atau 3 tahun sekali di setiap desa dan pemeriksaan kasus dilaksanakan ketika adanya aduan dari masyarakat adanya korupsi /penyelewengan dana desa. Pemeriksaan/audit dilakukan inspektorat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran hasil pekerjaan serta laporan pertanggungjawabannya. Mencermati dokumen-dokumen (dari RAB, gambar dan dokumen pengadaan), Membandingkan antara rencana dan realisasi pelaksanaan, Melakukan koreksi terhadap hal-hal yang kurang tepat, Memberikan pendampingan dengan membuka ruang seluasnya bagi Perangkat Desa / Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa (DD) untuk bertanya / konsultasi.

5. Reviu/analisis

- a. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah ada reviu yang dilakukan Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ ya Ada mas....reviu dilakukan oleh inspektorat guna menelaah ulang bukti bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, untuk reviu dana desa inspektorat melakukan ceking di pemerintah daerah terkait serapan dan realisasi belanja desa “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ jelas ada mas....reviu bagian tugas inspektorat yang harus dilaksanakan “ (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Ada..... “ (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ ya ada kegiatan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat “ (wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ ada mas... ” (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa inspektorat melaksanakan reviu terhadap penggunaan Dana Desa. Reviu dilakukan oleh inspektorat guna menelaah ulang bukti bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, untuk reviu dana desa inspektorat melakukan ceking di pemerintah daerah terkait serapan dan realisasi belanja desa.

- b. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, siapa yang melakukan reviu yang dilakukan Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Auditor yang ditunjuk menjadi Tim Reviu “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Auditor (Tim Reviu Dana Desa) yang ditunjuk Inspektur” (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Tim Reviu yang ditunjuk Inspektur “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ Tim yang ditugaskan “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ yang melaksanakan reviu Tim auditor yang ditugaskan “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

*“ yang melaksanakan reviu dari Tim auditor yang ditugaskan “
(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)*

Disimpulkan dari hasil wawancara adalah yang melaksanakan reviu pengawasan dana desa di kabupaten Brebes adalah Tim Reviu yang ditunjuk Inspektur.

c. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, kapan revidi yang dilakukan Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Secara periodik Triwulan “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Setiap tiga bulan sekali “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Setiap Tiga bulan sekali “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ Setiap Tiga bulan sekali “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa dan Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ Setiap Tiga bulan sekali “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ Setiap Tiga bulan sekali “(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa pelaksanaan revidi Dana Desa setiap tiga bulan sekali pada tahun berjalan anggaran. Ini sesuai dengan jadwal pencairan Dana Desa secara bertahap yaitu 3 kali yang dilakukan oleh setiap Desa.

- d. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana tahapan reviu yang dilakukan Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Meminta data, mengelola data, melaporkan ke Bupati dan BPKP “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Mengecek dokumen serta data-data yang ada dan melaporkan pada Bupati dan BPKP “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Mereviu penyerapan anggaran “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ inspektorat ke desa melakukan pengecekan dokumen serta data-data yang ada “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa, Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas serta Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desamengatakan :

“ Mereviu perolehan besaran anggaran dan penyerapan anggaran yang dilaksanakan oleh pihak Desa “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa tahapan reviu dilakukan inspektorat Brebes yaitu mereviu perolehan besaran anggaran dan penyerapan

anggaran yang dilaksanakan oleh pihak Desa dengan meminta data, mengelola data, melaporkan ke Bupati dan BPKP

- e. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana reviu yang dilakukan Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Mereviu perolehan besaran anggaran dan penyerapan anggaran yang dilaksanakan oleh pihak Desa “ (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim dan Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim megatakan :

“ kegiatan reviu dilakukan dengan pengecekan perolehan besaran anggaran dan penyerapan anggaran yang dilaksanakan oleh pihak Desa “ (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai kegiatan Reviu/analisis yang dilaksanakan oleh Inspektorat Brebes dapat disimpulkan bahwa inspektorat Brebes melaksanakan reviu/analisis penggunaan Dana Desa di Desa se Kabupaten Brebes. Pelaksanaan reviu dilakukan oleh Auditor (Tim Reviu Dana Desa) yang ditunjuk Inspektur secara periodik yaitu Triwulan/ tiga bulan sekali. Kegiatan reviu dilakukan dengan mengecek perolehan besaran anggaran dan penyerapan anggaran oleh pihak Desa, pengecekan dokumen, data-data yang ada dan melaporkan pada Bupati dan BPKP.

6. Monitoring/pemantauan

- a. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah ada monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Ada mas...dalam monitoring dana desa, kami mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap program kegiatan yang bersumber dari dana desa sesuai rencana yang telah ditetapkan “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Ya ada monitoring mas...inspektorat mengontrol pembangunan dan kegiatan desa yang bersumber dari dana desa ” (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Ada.....kami selalu datang untuk memonitoring kegiatan pembnagunan desa apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ ada mas....inspektorat selalu mengontrol kami dalam melaksanakan kegiatan pembangunan “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas dan Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ ya ada monitoring yang dilakukan inspektorat terkait dengan penggunaan Dana Desa “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ ada monitoring mas... “(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa inspektorat Brebes selalu melaksanakan monitoring ke setiap desa dalam pengawasan penggunaan Dana Desa.

- b. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Kapan dilakukan monitoring oleh Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler / Kasus terbit “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan terbit “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbit “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ pelaksanaan monitoring dilakukan setelah pemeriksaan oleh inspektorat mas..” (wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ ya mas.....setelah dilakukan pemeriksaan “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“ dilakukan 2 sampai 3 tahun sekali...”(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“ setelah adanya pemeriksaan mas....”(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ Biasanya diadakan setelah pemeriksaan”(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa pelaksanaan monitoring oleh Inspektorat dilaksanakan setelah adanya pemeriksaan penggunaan Dana Desa di setiap Desa.

- c. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, siapakah yang melaksanakan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Ada di Sekretariatan (Evalap) yaitu tim pemutakhiran...” (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ yang melaksanakan monitoring adalah Tim Pemutahiran inspektorat...”(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Tim Pemutahiran Data “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ tim dari inspektorat mas...mereka datang ke desa untuk melakukan monitoring penggunaan dana desa “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ ya dari tim inspektorat mas...”(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“ tim inspektorat....” (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“ tim inspektorat datang kesini mas..” (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ mereka dari tim inspektorat mas...”(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Dari wawancara terhadap informan dapat disimpulkan bahwa yang melaksanakan monitoring adalah tim pemutakhiran data dari inspektorat.

- d. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apa saja yang dilakukan dalam monitoring oleh Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Menindaklanjuti hasil temuan dan sasaran sesuai laporan (LHP) “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Menindak lanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Menindak lanjuti hasil temuan dan saran ada pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)” (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

*“ mereka tim inspektorat meminta data-data/ dokumen penyelenggaraan dana desa, dan pengecekan fisik pembangunan infrastruktur ...”
(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)*

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ tim inspektorat mengecek data data yang ada mengenai pembangunan yang bersumber dari dana desa....serta memberikan arahan arahan mas...”(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“ tim inspektorat melakukan monitoring dengan mengecek dan memeriksa dokumen perencanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik dan kegiatan kegiatan yang bersumber dari dana desa “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“ mereka memeriksa dan mengecek dokumen kegiatan pembangunan desa yang sedang atau sudah dikerjakan oleh desa “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ mereka memeriksa dan mengecek dokumen kegiatan pembangunan desa yang sedang atau sudah dikerjakan oleh desa dan menindaklanjuti hasil temuan dan saran pada laporan hasil temuan (LHP) “(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Dari wawancara terhadap informan disimpulkan bahwa monitoring dilakukan dengan menindaklanjuti hasil temuan dan sasaran sesuai laporan (LHP).

- e. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ pelaksanaan monitoring merupakan kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program secara berkala, dan itu dilaksanakan oleh inspektorat brebes dalam monitoring penggunaan dana desa di Kabupaten Brebes dengan Baik sesuai SOP yang berlaku dari tata cara monitoring dan jadwal monitoring yang telah direncanakan “ (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ monitoring yang dilaksanakan inspektorat Kabupaten Brebes Cukup baik....sesuai dengan jadwal perencanaan dan monitoring dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa di Brebes dalam pengelolaan Dana Desa yang baik efektif dan efisien.. “ (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ pelaksanaan monitoring inspektorat Kabupaten Brebes Cukup baik....sesuai dengan SOP yang ada dan sesuai jadwal perencanaan yang telah ditetapkan dan monitoring ini dapat menjadikan pengelolaan Dana Desa yang baik efektif dan efisien.. sesuai harapan dan juklak juknisnya “ (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ monitoring yang dilaksanakan inspektorat Brebes cukup bagus mas....mereka disamping mengecek dan memeriksa dokumen juga selalu mengingatkan dan mengarahkan kami untuk selalu berhati hati dan selalu

taat pada aturan sesuai dengan pedoman pengelolaan dana desa “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ monitoringnya baik mas....orangnya juga ramah dan selalu memberikan arahan dan masukan agar pengelolaan dana desa bisa berjalan dengan baik “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“ monitoring yang dilaksanakan inspektorat Brebes bagus...mereka mengecek dan memeriksa dokumen dan mengarahkan kami untuk selalu taat pada aturan sesuai dengan pedoman pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien“(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“ ya cukup baik mas.....mereka inspektorat Brebes tegas, teliti dan ramah...”(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ bagus mas....monitoringnya pengelolaan dana desa dengan memeriksa dan mengecek dokumen pelaksanaan dana desa dengan sangat teliti” (wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa pelaksanaan monitoring dilakukan dengan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program secara berkala.

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh Inspektorat Brebes dapat disimpulkan bahwa inspektorat Brebes melaksanakan monitoring penggunaan Dana Desa di Desa

se-Kabupaten Brebes. Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Tim dari inspektorat setelah laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler / Kasus terbit. Yang dilakukan inspektorat Brebes dalam monitoring adalah memeriksa dan mengecek dokumen kegiatan pembangunan desa yang sedang atau sudah dikerjakan oleh desa dan menindaklanjuti hasil temuan dan saran pada laporan hasil temuan (LHP).

7. Evaluasi

- a. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ jelas Ada mas....evaluasi merupakan tugas penilaian terhadap capaian program kegiatan pemerintah daerah, yang diantaranya evaluasi kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa. Kegiatan evaluasi ini kewajiban inspektorat selaku petugas pengawasan yang harus dilaksanakan demi tercapainya pengelolaan dana desa yang efektif dan efesien...tidak terjadi penyelewengan.. “ (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ ya ada mas....itu sudah melekat sebagai tugas dan fungsi inspektorat sebagai tahapan yang ada dalam SOP auditor.. “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ ada mas....itukan sebagai tahapan yang ada dalam SOP auditor..yang harus dilaksanakan “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ ada....inspektorat datang kesini untuk melaksanakan serangkaian kegiatan pengawasan diantaranya evaluasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan dana desa “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ iya ada evaluasi mas....inspektorat datang kesini untuk melaksanakan serangkaian kegiatan pengawasan diantaranya evaluasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan dana desa “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“ ada evaluasi yang dilaksanakan inspektorat ...mereka meng evaluasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan dana desa, bagaimana perencanaannya, pelaksanaannya dan pelaporannya kegiatan pembangunan yang dari dana desa “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“ ada....inspektorat mengevaluasi kegiatan desa baik infrastruktur maupun kegiatan pemberdayaan yang bersumber dari dana desa “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ ya ada evaluasi mas.... mengevaluasi capaian kegiatan pembangunan desa dari infrastruktur maupun kegiatan pemberdayaan yang bersumber dari dana desa “(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Dapat disimpulkan dari wawancara bahwa ada evaluasi penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

- b. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, kapan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh inspektorat Sebelum laporan-Laporan Hasil Pemeriksaan terbit, kami melaksanakan penilaian capaian penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa... “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Sebelum LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) terbit mas, evaluasi kam laksanakan ke desa-desa yang sudah melaksanaka kegiatan penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ evaluasi kami laksanakan ketika dalam proses penyusunan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) “ (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ kami dari pemerintah desa sebelumnya menerima pemberitahuan akan adanya evaluasi mas....untuk tepatnya kami tidak tahu, yang jelas ada evaluasi yang dilaksanakan inspektorat “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ kami tidak tahu jadwalnya mas...tapi ada evaluasi, mereka datang kesini untuk mengaudit pelaksanaan dana desa “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“ kami tidak tahu mas...tapi ada evaluasi “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“ tidak tahu mas...tapi yang jelas ada evaluasi, mereka datang kesini untuk mengaudit pelaksanaan dana desa ga tentu mas “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ada evaluasi tapi waktunya ga mesti mas.... Belum tentu satu tahun sekali “(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap Dana Desa yang diterima Desa oleh Inspektorat Brebes dilaksanakan Sebelum LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dengan melakukan penilaian capaian penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa.

- c. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, siapa yang melakukan evaluasi dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ yang melaksakan evaluasi adalah Semua Bidang Wilayah dan Sekretariat, mereka terjun langsung ke desa-desa untuk melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa, biar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya, dan tidak terjadi penyelewengan “(wawancara pada tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Semua Bidang Wilayah dan Sekretariat mas.....kami di tugaskan untuk itu, mengevaluasi, menilai capaian kegiatan pembangunan dari dana desa “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ ketua tim, Kabid wilayah, dan sekretarian...”(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ yang saya tahu ya dari inspektorat mas....”(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa dan Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ tim dari inspektorat “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ ya tim dari inspektorat mas....”(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Dapat disimpulkan bahwa yang melaksanakan evaluasi adalah Semua Bidang Wilayah dan Sekretariat, mereka terjun langsung ke desa-desa untuk melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa, biar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya, dan tidak terjadi penyelewengan.

- d. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, evaluasi apa saja yang dilakukan oleh Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ yang kami lakukan dalam evaluasi adalah penilaian terhadap Perencanaan kegiatan dan pelaksanaannya, pengadministrasian dan pelaporan Dana Desa apakah sudah sesuai atau tidak “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ ya kami melaksanakan penilaian capaian kegiatan pembangunan desa dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Dana Desa “ (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ temuan dari hasil pemeriksaan semua kegiatan pembangunan yang dilaksanaka oleh desa yang bersumber dari dana desa “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ inspektorat mengevaluasi dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan pembnagunan yang bersumber dari dana desa “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ mereka tim inspektorat mengevaluasi dengan meminta data data kegiatan dan mengecek langsung hasil pekerjaan pembangunan di lapangan “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“ inspektorat melakukan mengevaluasi dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan pembnagunan yang bersumber dari dana desa “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“ inspektorat mengevaluasi dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan pembnagunan yang bersumber dari dana desa “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ inspektorat mengevaluasi dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa “(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan kegiatan evaluasi adalah penilaian terhadap Perencanaan kegiatan dan pelaksanaannya, pengadministrasian dan pelaporan Dana Desa.

- e. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Brebes dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ evaluasi yang kami lakukan yaitu memberikan penilaian hasil pekerjaan kegiatan pembangunan desa,akuntabilitas pelaksana program kegiatan sehingga penggunaan anggaran dana desa bisa efektif dan efisien sesuai harapan yaitu tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ evaluasinya cukup baik mas...evaluasi kami laksanakan dengan memberikan penilaian capaian program kegiatan,hasil pelaporan dan akuntabilitas kinerja pelaksana kegiatan “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“evaluasi kami laksanakan dengan memberikan penilaian capaian semua program kegiatan,hasil pelaporan dan akuntabilitas kinerja pelaksana kegiatan yang bersumber dari dana desa“(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ tim inspektorat melaksanakan evaluasi di desa terkait pelaksanaan dana desa dengan memberikan penilaian hasil program kegiatan pembangunan yang di danai dari dana desa, mereka mengecek dari perencanaan, pelaksanaan dan meninjau langsung pembangunan infrastruktur....dan juga meneliti hasil pelaporan “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“memberikan penilaian hasil program kegiatan pembangunan desa, mereka mengecek dari perencanaan, pelaksanaan dan meninjau langsung pembangunan infrastruktur....dan juga meneliti hasil pelaporan “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“mereka mengecek dari perencanaan, pelaksanaan program kegiatan dan meninjau langsung pembangunan infrastruktur....dan juga meneliti hasil pelaporan “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“ evaluasi dilaksanakan dengan memberikan penilaian hasil program kegiatan pembangunan, mereka mengecek dari perencanaan, pelaksanaan dan meninjau langsung pembangunan infrastruktur.... Mereka juga meneliti pelaporan kegiatan“(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“dengan memberikan penilaian hasil program kegiatan pembangunan a, mereka mengecek dari perencanaan, pelaksanaan dan meninjau langsung pembangunan infrastruktur....dan juga meneliti administrasi dan pelaporan “(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat Brebes yaitu memberikan penilaian hasil pekerjaan kegiatan pembangunan desa,akuntabilitas pelaksana

program kegiatan sehingga penggunaan anggaran dana desa bisa efektif dan efisien sesuai harapan yaitu tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Brebes dapat disimpulkan bahwa inspektorat Brebes mengadakan evaluasi yang dilaksanakan oleh semua tim Irban Wilayah dan Sekretariat sebelum laporan - laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbit, dalam evaluasi inspektorat melaksanakan penilaian capaian penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa.

8. Pengujian

- a. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah ada pengujian yang dilakukan inspektorat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ ya ada mas....pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan kegiatan sesuai dengan rencana dan tidak adanya penyimpangan“(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Ada mas..“(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ ada..”(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ ada mas....inspektorat melakukan pengujian hasil kegiatan yang bersumber dari dana desa ..” (wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ ada mas....inspektorat melakukan pengujian hasil kegiatan yang bersumber dari dana desa ..” (wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Disimpulkan dari hasil wawancara yaitu inspektorat melaksanakan kegiatan pengujian terhadap hasil pekerjaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa sesuai dengan rencana dan tidak adanya penyimpangan.

- b. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Kapan dilakukan pengujian hasil pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ pengujian dilakukan pada saat audit dan evaluasi pelaporan hasil kegiatan“(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ pada saat ada pemeriksaan mas....“ (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ pengujian dilakukan pada saat audit dan evaluasi pelaporan hasil kegiatan“(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ pada saat inspektorat melakukan pemeriksaan ..” (wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“ pada saat inspektorat melakukan pemeriksaan ..” (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“ pada saat inspektorat melakukan pemeriksaan ..” (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ pada saat inspektorat melakukan pemeriksaan ..” (wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Hasil wawancara menyebutkan bahwa pengujian terhadap hasil kegiatan pembnagunan Desa dilaksanakan oleh Inspektorat pada saat audit dan evaluasi pelaporan hasil kegiatan.

- c. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, siapa yang melakukan pengujian dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ yang melaksanakan pengujian hasil kegiatan pembangunan desa ya Auditor atau tim pemeriksa dari inspektorat... “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Tim Pemeriksa / Auditor “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Tim Pemeriksa / Auditor “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ Tim inspektorat “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa yang melaksanakan pengujian hasil kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari DD yaitu Auditor atau tim pemeriksa dari inspektorat.

- d. Bapak/Ibu/Saudara, Apa saja yang dilakukan Inspektorat Brebes dalam pengujian pada pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“yang dilakukan inspektorat dalam melakukan pengujian adalah memeriksa Kelengkapan / Keabsahan dokumen pelaksanaan fisik di lapangan “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Melakukan Pengujian terhadap dokumen pengadaan / perhitungan, Menguji bukti-bukti (SPJ), Pemeriksaan dan pengukuran lapangan dan mengambil kesimpulan “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ melakukan pengujian terhadap dokumen pengadaan/perhitungan, menguji bukti-bukti (SPJ) dan kelengkapan dan menguji hasil pekerjaan “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ menguji semua data dan dokumen serta hasil pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ menguji semua data dan dokumen serta hasil pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“ menguji data-data dan dokumen serta hasil pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“ menguji semua data dan dokumen serta hasil pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan dan SPJnya “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ menguji semua data dan dokumen serta hasil pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan dan SPJnya “(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengujian yang dilakukan inspektorat yaitu memeriksa Kelengkapan / Keabsahan dokumen pelaksanaan fisik di lapangan.

- e. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana pengujian yang dilakukan Inspektorat Brebes dalam pengujian pada pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ pengujiannya baik mas...kami melakukannya dengan detail, dilihat kesesuaian antara dokumen-dokumen yang ada dengan hasil kegiatan baik fisik dan non fisik....kegiatan tersebut sesuai dengan RAB apa tidak“(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim mengatakan:

“ pengujiannya cukup Baik , kami melakukannya sangat teliti melihat kesesuaian antara hasil kegiatan yang dilaksanakan dengan dokumennya RAB yang diajukan...” (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“kami melakukannya sangat teliti melihat kesesuaian antara hasil kegiatan yang dilaksanakan dengan dokumennya RAB yang diajukan...” (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ menguji kesesuaian (membandingkan) antara RAB dengan hasil pelaksanaan/realisasi yang tercapai dari kegiatan yang didanai DD beserta kelengkapan administrasi yang melekat didalamnya “ (wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ menguji kesesuaian antara RAB dengan hasil pelaksanaan/realisasi yang tercapai dari kegiatan beserta kelengkapan administrasi yang melekat didalamnya “ (wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“membandingkan antara RAB dengan hasil pelaksanaan/realisasi yang tercapai dari kegiatan yang didanai DD beserta kelengkapan administrasi yang melekat didalamnya “ (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“ menguji kesesuaian (membandingkan) antara RAB dengan hasil pelaksanaan/realisasi yang tercapai dari kegiatan yang didanai DD beserta kelengkapan administrasi yang melekat didalamnya “ (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ menguji kesesuaian) antara RAB dengan hasil pelaksanaan/realisasi yang tercapai dari kegiatan yang didanai DD dan menguji kelengkapan administrasi (SPJ) “ (wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengujian dilakukan dengan baik yaitu melihat kesesuaian antara hasil kegiatan yang dilaksanakan dengan dokumennya RAB yang diajukan.

Dari hasil wawancara dengan informan dengan pertanyaan secara keseluruhan mengenai kegiatan pengujian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Brebes dapat disimpulkan bahwa inspektorat melaksanakan pengujian terhadap semua kegiatan desa yang bersumber dari Dana Desa. pengujian dilakukan pada saat audit dan evaluasi pelaporan hasil kegiatan. Pengujian dilakukan terhadap dokumen pengadaan / perhitungan, Menguji bukti-bukti (SPJ), Pemeriksaan dan pengukuran lapangan untuk melihat kesesuaian antara hasil kegiatan yang dilaksanakan dengan dokumennya RAB yang ditetapkan dan mengambil kesimpulan.

9. Penilaian

- a. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah ada penilaian yang dilakukan

Inspektorat Brebes pada pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Ada mas..... “ (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ ya Ada..... “ (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ ya Ada..... “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ Ada..... “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ ya Ada...mas “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Dapat disimpulkan bahwa inspektorat Brebes melaksanakan kegiatan penilaian seluruh kegiatan Desa yang bersumber dari Dana Desa.

- b. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, siapakah yang memberikan penilaian yang dilakukan Inspektorat Brebes pada pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ tim Auditor inspektorat.... “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Tim Pemeriksa / Auditor “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Tim Pemeriksa / Auditor inspektorat“(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ Tim Pemeriksa / Auditor dari inspektorat“(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ Tim Pemeriksa / Auditor “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“ Tim Pemeriksa / Auditor inspektorat“(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“ Tim Pemeriksa / Auditor inspektorat“(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ Tim Pemeriksa / Auditor inspektorat“(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa yang memberikan penilaian adalah Tim Pemeriksa / Auditor. Kegiatan penilaian dilakukan untuk menilai kebenaran , kecermatan, kredibilitas, efektifitas pelaksanaan keegiatan desa yang didanai DD

c. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, kapan pemberian penilaian yang dilakukan Inspektorat Brebes pada pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ pemberian penilaian diberikan setelah selesai pengawasan, tujuannya untuk menilai kebenaran , kecermatan, kredibilitas, efektifitas pelaksanaan

kegiatan desa yang didanai DD “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim mengatakan :

“ ya mas..penilaian dlaksanakan setelah pemeriksaan/pengawasan “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“penilaian dilaksanakan setelah pemeriksaan/pengawasan “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“penilaian dilaksanakan setelah semua pemeriksaan/pengawasan selesai dilakukan oleh Inspektorat “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“penilaian dilaksanakan setelah semua pemeriksaan/pengawasan selesai dilakukan oleh Inspektorat “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“penilaian dilaksanakan setelah semua pemeriksaan/pengawasan selesai dilakukan oleh Inspektorat “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“penilaian dilaksanakan setelah semua pemeriksaan/pengawasan selesai dilakukan oleh Inspektorat “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“penilaian dilaksanakan setelah semua pemeriksaan/pengawasan selesai dilakukan oleh Inspektorat “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan penilaian dilakukan setelah semua pemeriksaan/pengawasan Dana Desa selesai dilakukan oleh Inspektorat.

- d. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, poin apa sajakah penilaian dalam pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Inspektorat Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“poin yang menjadi penilaian penggunaan Dana Desa adalah Kesesuaian antara Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan hasil pelaksanaan/realisasi yang tercapai dari kegiatan yang didanai DD beserta kelengkapan administrasi yang melekat didalamnya serta kesesuaian hasil fisik pembangunan infrastruktur dengan spesifikasi yang sesuai dengan RAB nya.” (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Kesesuaian antara Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan hasil pelaksanaan/realisasi yang tercapai dari kegiatan yang didanai DD beserta kelengkapan administrasi yang melekat didalamnya.” (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ yang menjadi penilaian yaitu procedural, kesesuaian penyaluran dan penyerapan, dan kesesuaian fisik dengan RAB, serta kredibilitas pelaksana anggaran DD” (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ penilaiannya yaitu ada tidaknya kerugian Negara atas penggunaan dana desa yang diperoleh “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ yang menjadi penilaian yaitu kesesuaian penyaluran dan penyerapan, dan kesesuaian fisik dengan RAB ” (wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“ yang menjadi penilaian yaitu kesesuaian penyaluran dan penyerapan dana desa, dan kesesuaian fisik dengan RAB ” (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“ point penilaiannya yaitu kesesuaian penyaluran dan penyerapan, dan kesesuaian fisik dengan RAB ” (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ yang menjadi penilaian yaitu kesesuaian penyaluran dan penyerapan, dan kesesuaian fisik dengan RAB ” (wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa poin yang menjadi penilaian penggunaan Dana Desa adalah Kesesuaian antara Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan hasil pelaksanaan/realisasi yang tercapai dari kegiatan yang didanai DD beserta kelengkapan administrasi yang melekat didalamnya serta kesesuaian hasil fisik pembangunan infrastruktur dengan spesifikasi yang sesuai dengan RAB nya.

- e. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana tugas penilaian pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ penilaiannya baik mas....kami melakukan penilaian terhadap penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh desa yaitu menilai kebenaran pelaksanaan kegiatan, kecermatannya, kredibilitas pelasananya, efektif dan efesiensinya. “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim mengatakan:

“kami melakukan penilaian terhadap penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh desa yaitu menilai kebenaran pelaksanaan kegiatan, kecermatannya, kredibilitas pelasananya, efektif dan efesiensinya. “ (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“kami melakukan penilaian terhadap penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh desa yaitu menilai kebenaran pelaksanaan kegiatan, kecermatannya, kredibilitas pelasananya, efektif dan efesiensinya.” (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“penilaian yang dilaksanakan oleh inspektorat terhadap penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh desa yaitu menilai kebenaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, standard dan rencana yang telah ditetapkan. ” (wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“penilaian yang dilaksanakan oleh inspektorat terhadap penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh desa yaitu menilai kebenaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, standard dan rencana yang telah ditetapkan. ” (wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“penilaian yang dilaksanakan oleh inspektorat terhadap penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh desa yaitu menilai kebenaran

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, standard dan rencana yang telah ditetapkan.” (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

*“penilaian yang dilaksanakan oleh inspektorat terhadap penggunaan Dana Desa yaitu menilai kebenaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, standard dan rencana yang telah ditetapkan.”
(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)*

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“penilaian yang dilaksanakan oleh inspektorat terhadap penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh desa yaitu menilai kebenaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, standard dan rencana yang telah ditetapkan.” (wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa penilaian terhadap penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh inspektorat dengan baik yaitu menilai kebenaran pelaksanaan kegiatan, kecermatannya, kredibilitas pelasananya, efektif dan efesiensinya

Hasil wawancara dengan informan dari seluruh pertanyaan mengenai kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Brebes dapat disimpulkan bahwa inspektorat melaksanakan penilaian terhadap semua kegiatan desa yang bersumber dari Dana Desa dengan baik. Penilaian dilakukan oleh tim auditor/pemeriksa pada saat setelah selesai pengawasan, tujuannya untuk menilai kebenaran , kecermatan, kredibilitas, efektifitas pelaksanaan keegiatan desa yang didanai DD. Aspek yang menjadi penilaian adalah Kesesuaian antara Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan hasil pelaksanaan/realisasi yang tercapai dari kegiatan yang didanai DD beserta kelengkapan administrasi

yang melekat didalamnya serta kesesuaian hasil fisik pembangunan infrastruktur dengan spesifikasi yang sesuai dengan RAB nya.

10. Pengusutan

- a. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah ada pengusutan yang dilakukan Inspektorat Brebes pada pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ jelas ada pengusutan mas...pengusutan dilakukan inspektorat ketika ada laporan dari masyarakat atau temuan langsung oleh inspektorat adanya indikasi atau penyelewengan penggunaan Dana Desa“(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ ya ada pengusutan ketika ada kasus yang terjadi terhadap penyimpangan penggunaan Dana Desa “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Ada mas... “ (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ Ada mas...“(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ Ada mas...“(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa dan Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas Ciomas mengatakan :

“ ada pengusutan mas “ (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ ya ada mas.... ”(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa inspektorat Brebes melakukan kegiatan pengusutan , pengusutan dilakukan inspektorat ketika ada laporan dari masyarakat atau temuan langsung oleh inspektorat adanya indikasi atau penyelewengan penggunaan Dana Desa.

- b. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, kapan dilakukan pengusutan Inspektorat Brebes pada pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ pengusutan dilakukan saat ada kasus atau penyelewengan penggunaan dana desa ”(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Apabila didapatkan kejanggalan dalam penggunaan Dana Desa maka dilakukan Pemeriksaan Khusus / Kasus ” (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ ketika didapatkan kejanggalan dalam penggunaan Dana Desa ” (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ ketika ada indikasi penyelewengan dalam penggunaan Dana Desa yang dilaporkan oleh masyarakat.... ”(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ ketika ada indikasi penyelewengan dalam penggunaan Dana Desa yang dilaporkan oleh masyarakat.... ”(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“ ketika adanya penyelewengan dalam penggunaan Dana Desa.” (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“ ketika ada penyelewengan dana desa yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya” (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ ketika ada penyalahgunaan dalam penggunaan Dana Desa, yang biasanya berawal dari laporan masyarakat....”(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa kegiatan pengusutan dilakukan saat ada kasus atau penyelewengan penggunaan dana desa.

c. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apa saja yang dilakukan inspektorat pada proses pengusutan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ proses pengusutan dilakukan dari pemeriksaan kesesuaian fisik dengan proposal /RAB dan keabsahan SPJ “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Melakukan Pengusutan terhadap dokumen pengadaan/perhitungan, Melakukan wawancara dengan pihak terkait, Pemeriksaan dan mengusut bukti-bukti (SPJ), Pemeriksaan dan pengukuran lapangan, Membuat perbandingan, Mengambil kesimpulan “ (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“Pengusutan dilakukan dengan memeriksa terhadap dokumen pengadaan/perhitungan, pengelolaan anggaran, kualitas dan kuantitas pekerjaan. Melakukan wawancara dengan pihak terkait, Pemeriksaan dan menguust bukti-bukti (SPJ), Pemeriksaan dan pengukuran lapangan, Membuat perbandingan, Mengambil kesimpulan, dan ketika ada kejanggalan ya dilakukan tindak lanjut pengusutan “(wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya mengatakan :

“ mengusut dari prosedur awal, pagu anggaran, proposal rencana penggunaan dana desa, pencairan, pelaksanaan, hingga hsil dari kegiatan fisik maupun non fisik yag tercapai sehingga akan sendirinya terdeteksi dan teridentifikasi penyimpangan yag bersifat teknis maupun non teknis “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Menurut Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ dengan mengecek nota- nota belanja, mengecek pelaksana kegiatan yang di SPJkan...”(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas mengatakan :

“ menghadirkan pihak pihak terkait yag bertanggung jawab untuk diaudit pelaksanaan dana desa “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas menjawab :

“ dengan mengecek nota- nota belanja, mengecek pelaksana kegiatan yang di SPJkan...”(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“mengumpulkan penanggungjawab kegiatan untuk dicek kebenaran pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa baik kegiatan fisik maupun non fisik “(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa yang dilakukaan dalam kegiatan pengusutan adalah melakukan pengecekan terhadap dokumen pengadaan/perhitungan, Melakukan

wawancara dengan pihak terkait, Pemeriksaan dan mengusut bukti-bukti (SPJ), Pemeriksaan dan pengukuran lapangan, Membuat perbandingan, Mengambil kesimpulan.

- d. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana proses pengusutan yang dilakukan Inspektorat Brebes pada pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Proses pengusutan di mulai dari perencanaan, pelaksanaan pekerjaan s/d pengukuran hasil pekerjaan dan Laporan Pertanggung Jawaban. “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Apabila terjadi hal-hal yang dianggap janggal dan bermasalah atau tidak sesuai dengan aturan yang ada” (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Proses pengusutan di mulai dari perencanaan, pelaksanaan pekerjaan s/d pengukuran hasil pekerjaan dan Laporan Pertanggung Jawaban. “ (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya dan Bapak Kasid sebagai Ketua

TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ pengusutan dilakukan dari penelusuran kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan (SPJ) kegiatan “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas dan Bapak Holid selaku

Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan hal sama, mereka menjawab :

“ Proses pengusutan di mulai adanya pelaopran dari masyarakat tentang adanya kejanggalan penggunaan dana desa dari perencanaan,

pelaksanaan pekerjaan s/d pengukuran hasil pekerjaan dan Laporan Pertanggung Jawaban. “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ Proses pengusutan di mulai adanya pelaopran dari masyarakat tentang adanya kegagalan penggunaan dana desa” (wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa proses pengusutan di mulai dari perencanaan, pelaksanaan pekerjaan s/d pengukuran hasil pekerjaan dan Laporan Pertanggung Jawaban.

Hasil wawancara dengan informan dari pertanyaan keseluruhan mengenai kegiatan pengusutan yang dilakukan oleh Inspektorat Brebes dapat disimpulkan bahwa inspektorat melaksanakan pengusutan terhadap adanya kasus penyalahgunaan Dana Desa dengan baik . Pengusutan dilakukan oleh tim auditor/pemeriksa pada saat ada kasus atau penyelewengan penggunaan dana desa. Tahapan Pengusutan diawali dengan pemeriksaan dokumen pengadaan/perhitungan, penggalian informasi dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait, Pemeriksaan dan mengusut bukti-bukti (SPJ), pemeriksaan dan pengukuran lapangan, dan membuat perbandingan yang pada akhirnya mengambil kesimpulan.

A. Indikator pengelolaan Dana Desa adalah :

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai :

e. Penyelenggaraan pemerintahan

- a. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah ada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Brebes yang didanai dari Dana Desa?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Tidak ada yakni sesuai dengan Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 bahwa Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tidak diprioritaskan dalam Dana Desa 2018 “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim dan Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim mengatakan :

“ Tidak Ada mas....dana desa tidak diperuntukan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa “ (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa mengatakan :

“ pada tahun 2018 Tidak Ada mas....namun pada tahun 2019 ada penyelenggaraan pemerintahan desa yang didanai Dana Desa “ (wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas dan Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ oh...Tidak boleh mas....dana desa tidak gunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ ya tidak ada mas.....”(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan dari hasil wawancara yaitu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang didanai Dana Desa pada tahun 2018 Tidak Ada, namun pada tahun 2019 ada penyelenggaraan pemerintahan desa yang didanai Dana Desa.

- b. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, kegiatan apa saja yang dilakukan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang didanai dari Dana Desa?

Samsul Arif selaku Kepala Desa dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ hanya pengadaan SID (Sistem Informasi Desa SIPBM) (wawancara tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas dan Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ pada tahun 2019 hanya pengadaan SID (Sistem Informasi Desa SIPBM)” (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang didanai desa pada tahun 2019 hanya pengadaan SID (Sistem Informasi Desa SIPBM).

- c. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, siapa saja yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Brebes ?

Samsul Arif selaku Kepala Desa dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ yang melaksanakan pembangunan adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan sebagai penanggungjawab adalah Kepala Desa..” (wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa dan Bapak Holid selaku Ketua TPK

Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ yang melaksanakan pembangunan adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan sebagai penanggungjawab adalah Kepala Desa..” (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa yang melaksanakan pembangunan adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan sebagai penanggungjawab adalah Kepala Desa.

Hasil wawancara dengan informan dari keseluruhan pertanyaan mengenai penggunaan dana desa untuk bidang penyelenggaraan pemerintah dapat disimpulkan bahwa dana desa tidak dibelanjakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini sesuai dengan Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 bahwa Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tidak diprioritaskan dalam Dana Desa 2018. Namun di tahun 2019 Dana Desa bisa di belanjakan hanya untk pengadaan SID (Sistem Informasi Desa SIPBM).

f. Pembangunan

- a. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerinatah desa dari anggaran dana desa Kabupaten Brebes ?

Samsul Arif selaku Kepala Desa dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya Sindangjaya mengatakan :

“ ya ada banyak mas...seperti pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana prasarana social pelayanan dasar, sarana prasarana usaha

ekonomi desa, sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa dan Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ ya ada banyak sekali mas...”(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ ada mas...”(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa ada kegiatan pembangunan yaitu pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana prasarana social pelayanan dasar, sarana prasarana usaha ekonomi desa, sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup.

- b. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, siapakah yang melaksanakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dari anggaran dana desa Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang di bantu oleh Kepala Desa” (wawancara pada tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim :

“ Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang di bentuk Kepala Desa” (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Menurut Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab :

“ Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ” (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang di bantu oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa dan Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yag di bantu oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ Tim Pengelola Kegiatan (TPK)” (wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa yang melaksanakan pembangunan adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang di bantu oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

- c. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, kapan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dari anggaran dana desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ kegiatan pembangunan dilaksanakan setelah penyaluran Dana Desa diterima” (wawancara pada tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim dan Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim :

“ Iya mas...Setelah penyaluran Dana Desa diterima “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ pembangunan di desa dilaksanakan pata setiap tahun anggaran setelah penyaluran dana diterima “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas dan Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ Pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan setelah adanya pencairan DD, yang pencairannya secara bertahap “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ setelah adanya pencairan Dana Desa Mas....biasanya tersedianya dana Desa sekitar bulan April” (wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan di desa dilaksanakan pata setiap tahun anggaran setelah penyaluran dana diterima.

- d. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Pembangunan apa saja yang dilakukan dari anggaran dana desa di Kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 diprioritaskan untuk Pembangunan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan : Lingkungan Pemukiman ; Transpotasi; energy ; informasi dan komunikasi Pembangunan sarana prasarana dasar untuk pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan : Kesehatan masyarakat ; pendidikan dan kebudayaan Usaha ekonomi yakni BUMDes” (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim dan Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab:

“ Pembangunan Drainase, Pembangunan Penahan Tebing, Pembangunan Lapangan Olahraga, Pembangunan Jalan/Sandset/Rabat beton dan lain-lain ” (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ Dana Desa digunakan untuk pembangunan fisik infrastruktur seperti pengaspalan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan drainase dan pengadaan sarana dan prasana Desa...”(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas dan Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan fisik (infrastruktur) seperti Pembangunan Drainase, Pembangunan Penahan Tebing, Pembangunan Lapangan Olahraga, Pembangunan Jalan/Sandset/Rabat beton dll serta pembangunan non fisik sarana prasarana “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ pembangunan infrastruktur seperti pengaspalan jalan, pembuatan draenase, pembuatan jalan dll, serta pengadaan non fisik seperti penyaluran dana kesehatan, pendidikan dan ekonomi seperti pendirian BUMDes...”(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan desa meliputi pembangunan fisik (infrastruktur) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa masing-masing dan di perbolehkan oleh aturan, seperti Pembangunan Drainase, Pembangunan Penahan Tebing, Pembangunan Lapangan Olahraga,

Pembangunan Jalan/Sandset/Rabat beton dll serta pembangunan non fisik sarana prasarana.

- e. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana pembangunan yang dilakukan oleh desa di Kabupaten Brebes dengan biaya dari anggaran Dana Desa yang diperoleh ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Pembangunan dilaksanakan sesuai RAPBDes yang telah ditetapkan , diharapkan tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi kepala desa maupun perangkatnya...kegunaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil pembangunan desa “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim dan Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim mengatakan:

“ pembnagunan Desa yang di danai Dana Desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan. Dilaksanakan sesuai juklak dan juknis.....diharapkan Dana Desa digunakan dengan sebaik – baiknya untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil pembangunan desa “ (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ pembangunan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang sebelumnya dilakukan musrenbangdes..untuk menampung aspirasi prioritas pembangunan, pelaksanaan yang dilakukan oleh TPK dan pelaporan dengan pembuatan SPJnya “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa dan Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ pembangunan dilaksanakan sesuai tahapan – tahapan, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan..... pelaksanaan dilakukan oleh TPK dan pelaporan dengan pembuatan SPJnya “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ Kegiatan pembangunan melalui proses perencanaan, pelaporan “(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa pembangunan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang sebelumnya dilakukan musrenbangdes..untuk menampung aspirasi prioritas pembangunan, pelaksanaan yang dilakukan oleh TPK dan pelaporan dengan pembuatan SPJnya.

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan dapat disimpulkan bahwa dana desa digunakan untuk pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang di bantu oleh Kepala Desa pada saat tahun anggaran yaitu setelah Dana Desa terealisasi/turun kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seperti Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 diprioritaskan untuk Pembangunan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan : Lingkungan Pemukiman , Transpotasi, energi, informasi dan komunikasi. Pembangunan sarana prasarana dasar untuk pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan : Kesehatan masyarakat , pendidikan dan kebudayaan Usaha ekonomi yakni BUMDes.

g. Pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan

- a. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Apa ada kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang dibiayai dengan anggaran Dana Desa di kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Ada, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.” (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim dan Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab:

“ Ada....kegiatan pemberdayaan banyak “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ jelas ada mas.....”(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas dan Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ ada kegiatan pemberdayaan masyarakat mas.....”(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ ada ..”(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa ada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di danai dari Dana Desa.

- b. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, siapa yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang dibiayai dengan anggaran Dana Desa di kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Des yang dibentuk Kepala Desa” (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim dan Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim:

“ Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk Kepala Desa “ (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ yang melaksanakan ya dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk Kepala Desa “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Ciomas dan Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Masyarakat “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Masyarakat “(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Des yang dibentuk Kepala Desa.

- c. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, kapan kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang dibiayai dengan anggaran Dana Desa di kabupaten Brebes ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ kegiatan pemberdayaan dilaksanakan setelah Dana Desa terealisasi “(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim dan Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab:

“ Setelah Dana Desa diterima “(wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya mengatakan :

“ kegiatan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan..setelah dana desa terealisasi “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa dan Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ pada tahun anggaran harus dilaksanakan mas.....biasanya ya setelah DD turun ” (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ setelah DD terealisasi ... yang biasanya bertahap “(wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pada kegiatan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan setelah dana desa terealisasi.

- d. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, kegiatan apa saja yang dibiayai dengan anggaran Dana Desa untuk Pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ Sesuai dengan Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 bahwa Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tidak diprioritaskan dalam Dana Desa 2018.

Yang diprioritaskan meliputi :

- *Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa*
- *Pengembangan kapasitas di desa meliputi :pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa*
- *Pengembangan ketahanan masyarakat desa*
- *Pengelolaan pengembangan system informasi desa*
- *Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;*
- *Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup*
- *Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;*
- *Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;*
- *Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;*
- *Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan*
- *Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa “*

(wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim dan Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab:

“ pemberdayaan bidang kesehatan, pendidikan dan bidang ekonomi..seperti kegiatan posyandu kesehatan, kegiatan pengentasan buta aksara, Kegiatan pelatihan/kursus menyetir, menjahit, dan keterampilan lain lainnya, Penyertaan modal BUMDes” (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa Sindangjaya dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa mengatakan :

“ pemberdayaan dalam hal kesehatan, pendidikan dan bidang ekonomi..seperti kegiatan posyandu kesehatan, kegiatan pengentasan buta aksara, kegiatan pengentasan kemiskinan, Kegiatan pelatihan/kursus menyetir, menjahit, dan keterampilan lain lainnya, sera Penyertaan modal BUMDes” (wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“kegiatan bidang kesehatan seperti posyandu, kegiatan pengentasan buta aksara, kegiatan pengentasan kemiskinan, Kegiatan pelatihan/kursus menyetir, menjahit, dan keterampilan lain lainnya, sera Penyertaan modal BUMDes” (wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ kegiatan pelatihan ketrampilan,bontek dan penyertaan modal BUMDes..”

Disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Dana Desa yaitu pemberdayaan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan bidang ekonomi, seperti kegiatan posyandu kesehatan, kegiatan pengentasan

buta aksara, kegiatan pengentasan kemiskinan, Kegiatan pelatihan/kursus menyetir, menjahit, dan keterampilan lain lainnya, serta Penyertaan modal BUMDes

- e. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara, Bagaimana pengelolaan dana desa yang digunakan untuk anggaran Pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan ?

Menurut Bapak Wiryawan Hadi, S.H. selaku Kepala Bidang Irban wilayah II, mengatakan :

“ kegiatan pemberdayaannya cukup baik dan diharapkan Dapat meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa” (wawancara tanggal 5 Nopember 2019)

Dikatakan oleh Bapak Adi Susanto, S.T. selaku Ketua tim dan Ibu Ema Kusuma D, S.IP, M.Si selaku Anggota Tim menjawab:

“ kegiatan pemberdayaannya sangat baik sekali sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa” (wawancara tanggal 11 Nopember 2019)

Samsul Arif selaku Kepala Desa dan Bapak Kasid sebagai Ketua TPK Dana Desa Sindangjaya Sindangjaya mengatakan :

“ kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di danai dari DD sangat banyak...di harapkan dapat dikelola dan digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dirasakan manfaatnya dan tujuannya bisa tercapai yaitu masyarakat yang berdaya dan meningkat kesejahteraannya “(wawancara pada tanggal 19 Nopember 2019)

Bapak Abdul Rochim selaku Kepala Desa dan Bapak Holid selaku Ketua TPK Dana Desa Ciomas mengatakan :

“ kegiatan pemberdayaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat..., selama ini kegiatannya cukup baik, seperti kursus ketrampilan

masyarakat dirasakan bisa membantu masyarakat “(wawancara pada tanggal 21 Nopember 2019)

Menurut Bapak Sihit Nurtanto, A.Md selaku Pendamping Desa menjawab :

“ kegiatan pemberdayaan sangat bagus mas....” (wawancara pada tanggal 27 Nopember 2019)

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa dana desa digunakan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bersama masyarakat pada saat tahun anggaran yaitu setelah Dana Desa terealisasi/turun kegiatan. Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan seperti :

- Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa
- Pengembangan kapasitas di desa meliputi : pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- Pengembangan ketahanan masyarakat desa
- Pengelolaan pengembangan system informasi desa
- Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta

pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

- Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup
- Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
- Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa

V.2 Hambatan yang di hadapi oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengawasan Dana Desa.

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang optimal perlu adanya pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang tidak lepas dari berbagai faktor atau kendala yang mempengaruhi perannya dalam mencapai tujuan.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam pengawasan Dana Desa yaitu masalah kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia. Jumlah pegawai yang ada hanya

berjumlah 54 orang. Dan terbagi hanya menjadi 4 (empat) tim yang disebut Irban. Masing masing tim berjumlah 5-6 pegawai. Sedangkan jumlah desa yang harus di audit di Kabupaten Brebes ada sebanyak 292 Desa. Belum lagi tugas pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Brebes di instansi pemerintah yang lain. Jumlah yang cukup banyak yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai inspektorat Brebes yang hanya berjumlah 54 pegawai. Itupun tidak semuanya melaksanakan tugas audit/pemeriksaan pada desa-desa. Jadi tidak semua desa dapat di audit pada setiap tahunnya. Sehingga pengawasan Dana Desa tidak maksimal, yang nantinya rentan munculnya penyelewengan terhadap Dana Desa. Sedangkan Desa mendapatkan bantuan keuangan Dana Desa setiap tahun. Pengawasan reguler yang dapat dilaksanakan Inspektorat Brebes terhadap penggunaan Dana Desa di setiap Desa se Kabupaten Brebes hanya di lakukan 2-3 Tahun sekali. Terkecuali Pengawasan kasus/khusus yang dilaksanakan ketika ada laporan/pengaduan masyarakat adanya indikasi penyalahgunaan penggunaan Dana Desa. Laporan yang masuk diferifikasi kebenarannya dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu.

Kualitas sumber daya manusia (pegawai) dalam sebuah organisasi sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Seperti halnya kualitas pegawai Inspektorat Brebes yang masih rendah. Pegawai inspektorat Brebes masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi sebagai auditor, ini ditunjukan dengan tingkat pendidikan yang masih banyak lulusan SLTA.

V.3. Pembahasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pengawasan lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Pengawasan diartikan juga suatu bentuk pemeriksaan dan pengontrolan agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya wujud semula.

Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan salah satu dari instansi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan, yang didalamnya pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah perangkat pengawas umum yang diperbantukan kepada Bupati/Walikota dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah Kabupaten/Kota, yang taktis operasional langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi. Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintahan daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tahun 2016. Pengawasan Dana Desa menjadi bagian dari pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam ruang lingkup pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Guna memastikan penggunaan Dana Desa berjalan secara tertib, transparan, partisipatif dan akuntabel serta sesuai dengan apa yang sudah disusun dan direncanakan sebelumnya maka perlu pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa tersebut.

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Brebes yang tertuang dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 004 Tahun 2017 pada pasal 1 butir 9, inspektorat sebagai pemeriksa/audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Tugas dan fungsi Pengawasan Inspektorat dapat dinilai dari beberapa aspek yang meliputi : SOP Pengawasan sebagai acuan kerja Inspektorat, Sumber Daya Manusia yang dimiliki, kegiatan Pemeriksaan/audit, kegiatan-kegiatan yang menjadi Tupoksi inspektorat yaitu kegiatan Perencanaan, kegiatan Reviu, kegiatan Monitoring/pemantauan, kegiatan Evaluasi, kegiatan Pengujian, kegiatan Penilaian dan kegiatan pengusutan ketika adanya aduan dari masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan di atas diketahui bahwa Inspektorat Brebes dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu :

1. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat tentunya SOP sangat diperlukan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara baik dan maksimal. Inspektorat Brebes dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP yang ada. SOP terdiri dari Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus yang tertuang dalam peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 004 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut memuat kewajiban-kewajiban dan tahapan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat. Untuk lebih mendalami SOP pengawasan dan pemeriksaan tersebut, para pegawai inspektorat melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan House Trainning (PKS) yang di adakan oleh Inspektorat Provinsi maupun pusat. Serta selalu dilakukan kegiatan koordinasi internal seluruh jajaran Inspektorat Brebes sebelum melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan ke Desa-Desa.
2. Perencanaan merupakan proses yang mendefinisikan tujuan dari oraganisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan serta mengembangkan rencana aktifitas kerja. Inspektorat Brebes sebelum melakukan kegiatan pemeriksaan, melakukan proses perencanaan dengan membuat jadwal dan persiapan pengawasan rencana kegiatan audit dalam

tahun yang bersangkutan yang disebut program kerja pengawasan Tahunan (PKPT), serta menetapkan sumber daya yang diperlukan. Penentuan prioritas kegiatan audit didasarkan pada evaluasi risiko yang dilakukan oleh APIP dan dengan mempertimbangkan prinsip kewajiban menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat, mengkomunikasikan dan meminta persetujuan Rencana Pengawasan Tahunan, pengelolaan sumberdaya, menetapkan kebijakan dan prosedur, melakukan koordinasi, dan nantinya menyampaikan laporan berkala mengenai realisasi kinerja dan kegiatan audit yang telah dilaksanakan

3. Sumber daya merupakan komponen yang penting dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Terutama sekali sumber daya manusia . Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan sumberdaya manusia yang handal dan mencukupi. Sumber daya manusia / pegawai Inspektorat Brebes berjumlah 54 Orang pegawai. Pelaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan Dana Desa dibagi dalam beberapa kelompok/tim yang terbagi menjadi 4 (empat) tim yang disebut Inspektur Pembantu (Irban) wilayah. Masing masing tim berjumlah 5-6 orang yang bertugasnya di wilayah masing masing. Tingkat pendidikan pegawai pegawai Inspektorat Brebes yaitu SMA = 20 Orang, D.3 = 1 Orang , S.1 = 29 Orang dan S.2 = 4 Orang. Perbandingan antara auditor dari 4 (empat) tim Irban yang bertugas pemeriksaan penggunaan Dana Desa dengan jumlah desa yang diperiksa sebanyak 292 tentunya tidak sebanding, sehingga Inspektorat

Brebes hanya melakukan pengawasan regular yaitu 2 sampai dengan 3 tahun sekali di setiap desa.

Akuntabilitas pegawai inspektorat cukup baik, ini ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan audit yang dilakukan pegawai inspektorat Brebes sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. Pemeriksaan dan pengawasan juga tepat waktu sesuai target yang ditentukan, dalam menjalankan tugas pemeriksaan dan pengawasan tidak memungut biaya apapun kepada pihak desa.

4. Audit merupakan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas. Inspektorat Brebes melaksanakan pemeriksaan / audit penggunaan Dana Desa di Desa se Kabupaten Brebes dengan baik yaitu pemeriksaan regular dan pemeriksaan kasus/khusus. Pemeriksaan dilakukan secara periodik yang diatur dalam jadwal (PKPT) kecuali kasus yang akan dilakukan secara langsung tanpa melihat jadwal. Pemeriksaan regular dilaksanakan 2 atau 3 tahun sekali di setiap desa dan pemeriksaan kasus dilaksanakan ketika adanya aduan dari masyarakat adanya korupsi /penyelewengan dana desa. Pemeriksaan/audit dilakukan inspektorat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran hasil pekerjaan serta laporan pertanggungjawabannya. Mencermati dokumen-dokumen (dari RAB, gambar dan dokumen pengadaan), Membandingkan antara rencana dan

realisasi pelaksanaan, Melakukan koreksi terhadap hal-hal yang kurang tepat, Memberikan pendampingan dengan membuka ruang seluasnya bagi Perangkat Desa / Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa (DD) untuk bertanya / konsultasi.

5. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Inspektorat Brebes melaksanakan reviu/analisis penggunaan Dana Desa di Desa se Kabupaten Brebes. Pelaksanaan reviu dilakukan oleh Auditor (Tim Reviu Dana Desa) yang ditunjuk Inspektur secara periodik yaitu Triwulan/ tiga bulan sekali. Kegiatan reviu dilakukan dengan mengecek perolehan besaran anggaran dan penyerapan anggaran oleh pihak Desa, pengecekan dokumen, data-data yang ada dan melaporkan pada Bupati dan BPKP.
6. Monitoring kegiatan inspektorat yang sangat penting. Kegiatan monitoring merupakan kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan ditingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan. Inspektorat Brebes melaksanakan monitoring penggunaan Dana Desa di Desa se-Kabupaten Brebes. Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Tim dari inspektorat setelah laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler / Kasus terbit. Yang dilakukan inspektorat Brebes dalam monitoring adalah memeriksa dan mengecek dokumen kegiatan pembangunan desa yang sedang atau sudah dikerjakan oleh desa dan menindaklanjuti hasil temuan dan saran pada laporan hasil temuan (LHP).

7. Evaluasi adalah kegiatan rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan. Inspektorat Brebes mengadakan evaluasi yang dilaksanakan oleh semua tim Urban Wilayah dan Sekretariat sebelum laporan - laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbit, dalam evaluasi inspektorat melaksanakan penilaian capaian penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa.
8. Pengujian merupakan kegiatan untuk memastikan kualitas kegiatan yang dilaksanakan dengan spesifikasi rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Inspektorat Brebes melaksanakan pengujian terhadap semua kegiatan desa yang bersumber dari Dana Desa. pengujian dilakukan pada saat audit dan evaluasi pelaporan hasil kegiatan. Pengujian dilakukan terhadap dokumen pengadaan / perhitungan, Menguji bukti-bukti (SPJ), Pemeriksaan dan pengukuran lapangan untuk melihat kesesuaian antara hasil kegiatan yang dilaksanakan dengan dokumennya RAB yang ditetapkan dan mengambil kesimpulan.
9. Inspektorat melaksanakan penilaian terhadap semua kegiatan desa yang bersumber dari Dana Desa dengan baik. Penilaian dilakukan oleh tim auditor/pemeriksa pada saat setelah selesai pengawasan, tujuannya untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas pelaksanaan kegiatan desa yang didanai DD. Aspek yang menjadi penilaian adalah

Kesesuaian antara Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan hasil pelaksanaan/realisasi yang tercapai dari kegiatan yang didanai DD beserta kelengkapan administrasi yang melekat didalamnya serta kesesuaian hasil fisik pembangunan infrastruktur dengan spesifikasi yang sesuai dengan RAB nya.

10. Kegiatan pengusutan dilakukan oleh Inspektorat Brebes ketika adanya kasus penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh penanggungjawab pengguna anggaran. Pengusutan dilakukan oleh tim auditor/pemeriksa pada saat ada kasus atau penyelewengan penggunaan dana desa. Tahapan Pengusutan diawali dengan pemeriksaan dokumen pengadaan/perhitungan, penggalan informasi dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait, Pemeriksaan dan mengusut bukti-bukti (SPJ), pemeriksaan dan pengukuran lapangan, dan membuat perbandingan yang pada akhirnya mengambil kesimpulan.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Brebes dari kegiatan Perencanaan, kegiatan Reviu, kegiatan Monitoring/pemantauan, kegiatan Evaluasi, kegiatan Pengujian, kegiatan Penilaian dan kegiatan pengusutan, sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang ada namun tidak maksimal. Ini dikarenakan faktor kuantitas sumberdaya manusia yang sangat terbatas. Pegawai inspektorat hanya berjumlah 54 orang, sedang jumlah desa yang ada di Kabupaten Brebes sebanyak 292 Desa. belum lagi tugas pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Brebes terhadap instansi pemerintah daerah yang lain. Jumlah

pegawai yang ada sangat tidak sebanding dengan beban kerja inspektorat yang begitu banyak. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV, Irban – Irban ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur meliputi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dan Kecamatan serta Desa (termasuk Dana Desa) sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang ditetapkan. Sehingga tidak semua desa yang ada di Kabupaten Brebes mendapat pengawasan dari inspektorat setiap tahunnya. Pelaksanaan pengawasan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Brebes hanya bisa dilaksanakan 2 sampai 3 tahun sekali.

BAB VI

PENUTUP

Pada Bab V telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2017 di Kabupaten Brebes

VI.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2017 di Kabupaten Brebes , ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Brebes dalam pengawasan Penggunaan Dana Desa sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Namun pelaksanaannya belum optimal. Karena pengawasan Dana Desa yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Brebes tidak semuanya terlaksana secara menyeluruh pada setiap tahunnya. Inspektorat Brebes hanya melaksanakan pengawasan 2 atau 3 tahun sekali pada setiap desa. Serta pada pemeriksaan kasus, masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti. Tim pengawas yang turun langsung kelapangan dalam melaksanakan pemeriksaan reguler hanya terdiri dari 4 tim Irban yang masing-masing tim 7-8 orang. Jumlah tersebut belum mencukupi jika dibandingkan dengan obyek pemeriksaan yang terdiri dari 292 desa.

2. Kendala utama yang dihadapi oleh Inspektorat Brebes dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah minimnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia sehingga tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa tahun 2017 di Kabupaten Brebes. Dengan jumlah pegawai yang ada, dan terbagi 4 tim pengawas tidak sebanding dengan volume pengawasan penggunaan Dana Desa yang harus di laksanakan pada seluruh Desa di Kabupaten Brebes.

VI.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Inspektorat Kabupaten Brebes perlu meningkatkan integritas yang tinggi dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas. terutama dalam pelaksanaan pemeriksaan kasus, pemeriksaan reguler dan pemeriksaan fisik terhadap penggunaan dana desa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan cara menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk ke Inspektorat terkait masalah penggunaan dana desa dan melakukan pemeriksaan fisik hasil pembangunan yang menggunakan anggaran dana desa secara menyeluruh.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yaitu meningkatkan kegiatan pelatihan – pelatihan khusus auditor atau dengan mendorong kepada pegawai yang berpendidikan rendah/SLTA untuk

mengikuti studi lanjut dengan keilmuan yang sesuai dengan bidangnya sebagai auditor.

3. Inspektorat Kabupaten Brebes perlu menambahkan jumlah anggota pada setiap tim pengawas. Agar pemeriksaan dapat berjalan secara menyeluruh, mengingat waktu proses pemeriksaan yang singkat dan jumlah desa yang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas “Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Achmadi, Adib. 2005. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badrudin. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: ALFABETA.
- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djayasinga, Marselina. 2008. *Pengawasan APBD Apa, Siapa, dan Bagaimana*. Bandar Jawa Tengah: Lembaga Penelitian Universitas Jawa Tengah.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Moleong J, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdakarya.
- Robins, Stephen P dan Coulter Mary. 2010. *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1*. Jakarta: Erlangga
- Renstra Inspektorat Kabupaten Brebes 2017-2022
- Situmorang Victor M dan Juhir Jusuf. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat (Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Usman Effendi. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa “Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winardi. 2010. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang *Desa*.

Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang *kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tahun 2016*.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang *pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes*

Peraturan Bupati Brebes Nomor 4 Tahun 2017 tentang *Kebijakan Pengawasa Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017*